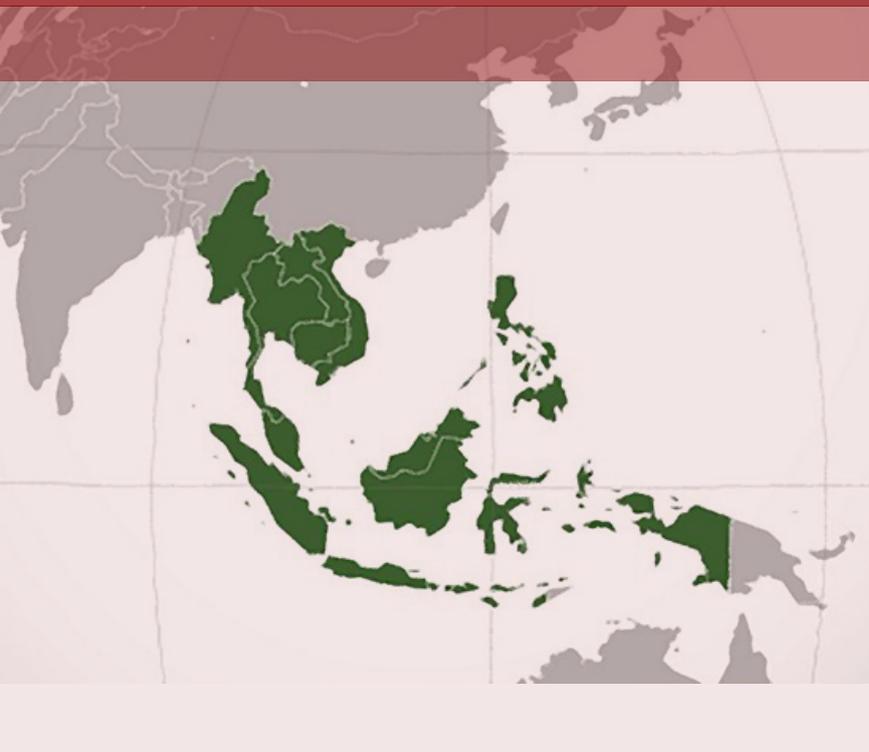


Diplomasi Parlemen Indonesia di Asia Tenggara



*Spektrum
Kepemimpinan
Indonesia di ASEAN
Inter-Parliamentary
Assembly:
2011 - 2012*

Diplomasi Parlemen Indonesia di Asia Tenggara



*Spektrum
Kepemimpinan
Indonesia di ASEAN
Inter-Parliamentary
Assembly:
2011 - 2012*

**Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2012**

Daftar Isi

Daftar Isi	i
A. Pengantar	1
Dr. Marzuki Alie, Ketua DPR RI / Presiden AIPA.....	1
Dr. Surahman Hidayat, MA, Ketua BKSAP / Ketua <i>AIPA National Group</i>	3
B. Pendahuluan	5
C. ‘Membumikan’ ASEAN dan AIPA (melalui seminar, lomba esai, <i>website, social media, dan film dokumenter</i>)	6
Seminar mengenai <i>AIPA: Enhancing the ASEAN Transformation into a Solid Community</i>	7
Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer	9
<i>Website AIPA dan Twitter</i>	11
Film Dokumenter	12
D. Kunjungan Kerja Presiden AIPA ke ASEAN Summit dan India, serta Lawatan ke Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam	13
<i>ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives (ASEAN Summit)</i>	13
<i>AIPA Visit ke India</i>	14
• Pertemuan dengan Ketua Parlemen India Lok Sabha	15
• Pertemuan dengan Ketua Oposisi Parlemen Lok Sabha	15
• Pertemuan dengan <i>Minister of State of External Affairs</i>	16
• Pertemuan dengan Presiden India	16
Lawatan Presiden AIPA ke Malaysia, Singapura, Myanmar	17
Malaysia	17
• Pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat (DPR) Malaysia.....	17
• Pertemuan dengan Ketua Dewan Negara	19
Singapura	19
• Pertemuan dan <i>Morning Tea</i> dengan Menteri merangkap Menteri Kedua Luar Negeri Singapura.....	20
• <i>Courtesy Call</i> dengan Ketua Parlemen Singapura	20
• <i>Courtesy Call</i> dengan Perdana Menteri Singapura	21



Myanmar	23
• <i>Courtesy Call</i> dengan Presiden Myanmar	23
• Pertemuan dengan Ketua Pyithu Hluttaw	24
• Pertemuan dengan Ketua Pyidaungsu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw	24
Catatan dari Lawatan ke Malaysia, Singapura, dan Myanmar	25
Lawatan Presiden AIPA ke Vietnam, Thailand, dan Kamboja	26
Vietnam	26
• Pertemuan dengan Ketua Parlemen Vietnam	26
• Pertemuan dengan Perdana Menteri Republik Sosialis	27
Thailand	27
• Pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand	28
• Pertemuan dengan Ketua Parlemen Kerajaan Thailand	28
Kamboja	29
• Pertemuan dengan Ketua Parlemen Kerajaan Kamboja	29
• Pertemuan dengan Perdana Menteri Kerajaan Kamboja.....	29
Catatan dari Lawatan ke Thailand, Vietnam, dan Kamboja.....	31
E. Hasil Sidang AIFOCOM dan Sidang <i>Executive Committee</i>	32
Sidang <i>AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace</i>	32
Sidang <i>Executive Committee</i>	34
F. Capaian Sidang Umum AIPA ke-33	36
Sekilas Sidang Umum AIPA ke-33	36
Sidang <i>Women of Parliamentarians of AIPA (WAIPA)</i>	40
Pesan Indonesia di Sidang Umum AIPA	41
Sidang Komisi Politik	44
Sidang Komisi Ekonomi	48
Sidang Komisi Sosial.....	51
Sidang Komisi Organisasi.....	53
Dialog dengan Parlemen <i>Observer</i>	55
Buku terbitan BKSAP	57

Surat ke Ketua ASEAN	58
Majalah <i>Highlite 33rd AIPA General Assembly</i>	59
Hibah AIPA untuk Indonesia Sebanyak USD20.000	60
Diplomasi DPR RI dalam Mendukung Perdamaian dan Stabilitas Regional: Dukungan terhadap <i>Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)</i> sebagai <i>Observer AIPA</i>	61
G. Catatan Indonesia terhadap Sekretariat Tetap AIPA	64
H. Isu-isu Pelik (Kamboja, Laut China Selatan, dan Myanmar)	66
Kamboja	66
Masalah Laut China Selatan	68
Kasus Rohingya	80
I. Penutup: Sudah Berhasilkah Indonesia Memimpin AIPA 2011 - 2012?	88
Galeri Photo	
Sidang AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace .	90
Lawatan ke Malaysia, Singapura, Myanmar	91
AIPA Visit ke India	92
Lawatan ke Vietnam, Thailand, dan Kamboja.....	93
Sidang Umum AIPA ke-33	94

A. Pengantar

Dr. Marzuki Alie
Ketua DPR RI / Presiden AIPA



Amanah kepemimpinan sebagai Presiden *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-33 dalam periode 2011–2012 kepada Ketua DPR RI merupakan momentum strategis bagi DPR RI untuk mendorong terwujudnya Masyarakat ASEAN 2015 yang dinantikan bangsa-bangsa di kawasan. Perjalanan panjang 37 tahun AIPA telah menorehkan banyak dinamika, yang memuat ragam prestasi yang telah dicapai, serta tantangan yang mesti terus dihadapi dan menuntut penyelesaian.

Tugas Parlemen Indonesia untuk turut serta berkiprah positif dalam mewujudkan ASEAN yang berkemakmuran, adil dan damai, dalam kerangka Masyarakat ASEAN 2015 tidaklah berhenti walau kepemimpinan AIPA tersebut telah beralih kepada Ketua Parlemen Brunei Darussalam pada akhir Sidang Umum AIPA ke-33 yang diadakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat – Indonesia, dari tanggal 16 s.d. 22 September 2012 yang lalu. DPR RI harus terus memegang peran kunci dalam diplomasi parlemen terutama di kawasan dan juga di fora diplomasi lainnya.



Kepemimpinan AIPA yang saya jabat dalam periode 2011 – 2012, memberi catatan penting dalam mendorong perkembangan dan dinamika ASEAN. Sosialisasi mengenai AIPA dan upaya mengeratkan hubungan dengan negara anggota AIPA diluar pertemuan dalam sebuah sidang dijalankan dengan lawatan dan pertemuan dengan kepala pemerintahan dan ketua-ketua parlemen dari negara-negara ASEAN yang dikunjungi, sambil juga mencari masukan dan respons atas isu-isu yang sedang berkembang di kawasan. Puncak dari amanah kepemimpinan AIPA ini adalah penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-33 yang Alhamdulillah telah berjalan dengan sukses ditandai dengan dihasilkannya sejumlah keputusan penting dan kehadiran peserta yang tinggi baik dari parlemen anggota maupun parlemen peninjau.

Saya menyampaikan penghargaan yang besar kepada semua pihak yang telah aktif mendukung sewaktu DPR RI menjabat Ketua AIPA, terutama kepada BKSAP sebagai *front liner* diplomasi parlemen, dan kepada tim yang terlibat dalam penyusunan dan perampungan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat kepada siapa pun yang membacanya.

Terima kasih.



Dr. Marzuki Alie

Dr. Surahman Hidayat, MA **Ketua BKSAP / Ketua AIPA** **National Group**



Assalamuálaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) selalu berperan aktif dalam percaturan politik regional di ASEAN, khususnya melalui *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Mengapa Indonesia perlu berperan aktif? Indonesia adalah pionir dalam mendorong terciptanya kawasan regional di Asia Tenggara. Pada tahun 1967, Indonesia tercatat sebagai salah satu “*founding father*” ASEAN dan sejak itu pula Indonesia terus memainkan peran penting dalam penyusunan visi dan misi ASEAN, termasuk dalam rencana pembentukan *ASEAN Community 2015*.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan terpenting di dunia yang selalu menjadi perhatian masyarakat global. Populasi masyarakat ASEAN saat ini mencapai hampir 600 juta jiwa dengan *Gross Domestic Product (GDP)* sebesar USD700 miliar dan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan integrasi regional. Indonesia memiliki kepentingan di ASEAN sebagai poros terdepan dalam lingkup geopolitik nasional. Indonesia juga merepresentasikan demokrasi dan dalam hal jumlah populasi penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia juga menyumbangkan angka yang signifikan terhadap pertumbuhan *market* ASEAN, sebagai salah satu pasar yang paling potensial di tingkat internasional.



Baik secara langsung maupun tidak langsung, kontinuitas ASEAN sebagai suatu komunitas yang terintegrasi secara menyeluruh, sangat bergantung pada peran aktif Indonesia. Sebagai contoh, kita sudah melihat bagaimana peran aktif Indonesia dalam inisiatif *peace-building* di kawasan seperti dalam hal isu perbatasan Thailand-Kamboja maupun dalam isu Laut China Selatan. DPR hadir untuk melengkapi apa yang telah dilakukan di tingkat eksekutif. Sebagai bagian dari *second-track diplomacy*, DPR memainkan peran penting dalam menciptakan ruang dialog bagi berbagai pemangku kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif tersebut dilaksanakan melalui keterlibatan Indonesia, khususnya DPR RI dalam AIPA.

Buku ini merupakan rekaman kegiatan AIPA dalam kepemimpinan Indonesia selama periode 2011-2012 dan disusun dengan tujuan untuk menggambarkan implementasi politik bebas aktif Indonesia, khususnya DPR RI, dalam dinamika politik di kawasan ASEAN selama satu tahun terakhir. Penerbitan buku ini juga diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara DPR RI dengan masyarakat luas serta mendorong partisipasi publik dalam menyongsong *ASEAN Community 2015*.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai referensi dan catatan sejarah Diplomasi Parlemen Indonesia dalam menapaki dinamika politik regional, dan semoga Allah SWT senantiasa meridai segala usaha kita.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dr. Surahman Hidayat, MA

B. Pendahuluan

Pada saat awal Ketua DPR RI diberi mandat menjadi Presiden AIPA pada tahun 2011 di Sidang Umum AIPA ke-32 di Kamboja, BKSAP telah menerbitkan buku yang menjelaskan mengenai sejarah AIPA, tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dan bagaimana Indonesia sebagai Presiden AIPA dapat memainkan peran dengan sebaik-baiknya di tingkat legislatif.

Setelah Indonesia menyerahkan kepemimpinan kepada Brunei Darussalam pada Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok pada tanggal 16 s.d. 22 September 2012, buku “Setahun DPR RI Memimpin AIPA” ini disusun sebagai upaya evaluasi apakah DPR RI telah maksimal dalam memainkan perannya sebagai Presiden AIPA.

Buku ini mencatat bagaimana upaya BKSAP DPR RI mendekatkan isu ASEAN dan AIPA ke masyarakat, kemudian hasil-hasil, raihan serta peran aktif Anggota Delegasi DPR RI di sidang yang diselenggarakan oleh DPR RI yaitu sidang AIFOCOM ke-9 di Yogyakarta dan Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok. Catatan-catatan penting dari Kunjungan Kerja Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA ke negara-negara anggota AIPA juga disarikan di sini. Di sisi lain, berbagai isu yang muncul pada saat kepemimpinan Ketua DPR RI menjadi Presiden AIPA, misalnya isu Rohingya dan Laut China Selatan, turut dikemukakan karena merupakan catatan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kepemimpinan DPR RI di AIPA. Terakhir, buku ini ditutup dengan harapan untuk AIPA kedepan dan peran apa lagi yang dapat dijalankan oleh Indonesia selepas menjadi Presiden AIPA.



C. ‘Membumikan’ ASEAN dan AIPA (melalui seminar, lomba esai, website, social media, dan film dokumenter)

Salah satu tantangan yang harus dijawab oleh DPR RI dalam mengemban amanat sebagai Presiden AIPA adalah mendekatkan ASEAN, dan utamanya AIPA, sebagai wadah parlemen-parlemen di Asia Tenggara kepada masyarakat. Jangankan kepada masyarakat, AIPA sendiri belum terlalu dikenal oleh seluruh anggota Dewan.

Belum dirasakannya ASEAN, apalagi *ASEAN Community* di masyarakat, tidak dapat dipungkiri dikarenakan ada gap yang sangat besar antara elit dengan masyarakat. Pertemuan level eksekutif mencapai puluhan per tahun, dan juga di tingkat legislatif -walaupun tidak sebanyak di tingkat eksekutif- parlemen telah membentuk forum AIPA sejak puluhan tahun lalu yang juga mempunyai pertemuan rutin. Sementara di sisi lain, hubungan antara AIPA dengan masyarakat kurang diperhatikan. Peran lembaga parlemen sangat penting untuk mensosialisasikan adanya ASEAN. Selama ini hubungan antar-ASEAN didominasi oleh pemerintah pusat, sehingga butuh upaya-upaya khusus untuk membawa pemahaman mengenai ASEAN sampai ke tingkat masyarakat luas.

Untuk itu segera setelah DPR RI menyetujui *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, langkah pertama yang dilakukan adalah mengenalkan organisasi ini kepada masyarakat, dan anggota parlemen sendiri. Walaupun kepemimpinan di AIPA bersifat bergiliran, Indonesia tidak mau memaknainya sebagai sesuatu yang *taken for granted*, namun ingin mengisinya dengan visi dan misi yang bertujuan menguatkan peran AIPA dan peran Indonesia di percaturan politik regional.

Untuk mengenalkan ASEAN -dan AIPA khususnya- BKSAP membuat beberapa program diantaranya:

- mengadakan Seminar mengenai AIPA dengan tema *Enhancing the ASEAN Transformation into a Solid Community*;
- mengadakan lomba penulisan karya tulis ilmiah populer mengenai Peran Parlemen dalam Terwujudnya *ASEAN Community 2015*;
- membuat *website* khusus yang didedikasikan untuk memberitakan informasi *update* dari AIPA; dan juga
- memanfaatkan media sosial, *twitter*.

Dan sebagai bahan edukasi dan informasi, dibuat film dokumenter mengenai AIPA dibawah kepemimpinan Indonesia.

Seminar mengenai AIPA: *Enhancing the ASEAN Transformation into a Solid Community*

Seminar dengan tema *AIPA: Enhancing the ASEAN Transformation into a Solid Community* dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dengan pembicara para pakar di bidang ASEAN yaitu:

- **Bagas Hapsoro**, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN bidang Masyarakat dan Organisasi;
- **Foster Gultom**, Sekretaris Direktorat Kerja sama ASEAN Kementrian Luar Negeri; dan
- **Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M.**, Guru Besar UI.

Seminar dibuka oleh Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie** dan Moderator adalah **Dr. Surahman Hidayat, MA**, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Sebagai undangan adalah Anggota DPR RI dan DPD RI, akademisi, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat.

Seperti telah diduga, dari diskusi yang berkembang masih banyak yang mempertanyakan manfaat ASEAN dan perlunya parlemen untuk berkumpul di wadah AIPA.

Dari seminar para pakar menyampaikan pesan bahwa maksud dan tujuan *ASEAN Community* yang dicanangkan tahun 2015 antara lain adalah untuk:

- mencapai kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan melalui upaya bersama;



- mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum.

Adanya pembagian pilar *ASEAN Community* dimaksudkan untuk mempersempit jenjang pembangunan di antara anggota ASEAN.

Disadari pula terdapat beberapa tantangan terhadap pembentukan *ASEAN Community* yang tidak dapat dipandang remeh, diantaranya adalah:

- krisis ekonomi global,
- kesenjangan pembangunan,
- ketahanan pangan,
- bencana alam,
- terorisme,
- kejahatan transnasional,
- kerja sama keamanan,
- maritim, dan
- perdagangan manusia.

Untuk menjawab tantangan itu, para kepala negara membuat komitmen *Roadmap ASEAN Community 2009–2015* yang merupakan ketegasan dari para bangsa di wilayah untuk mewujudkan cita-cita *ASEAN Community* ini. Disinilah, peranan AIPA sebagai anggota parlemen dan mitra pemerintah dalam pengawasan sangat besar dalam mendorong implementasi dari *Roadmap* tersebut.

Dari kerja sama di tingkat ASEAN, hal yang menonjol dari komunitas politik dan keamanan antara lain adalah masalah:

- pemajuan *good governance*,
- pemajuan dan perlindungan HAM,
- pemajuan prinsip-prinsip demokrasi, toleransi dan solidaritas,
- mendorong studi ASEAN,
- pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Di bidang ekonomi, seminar tersebut mencatat bahwa tantangan dalam komunitas ekonomi adalah masih sedikitnya *intra trade*. Karena selama ini negara-negara ASEAN masih memproduksi barang yang sama dan dijual ke pasar yang sama. Namun yang ingin dibangun saat ini adalah memproduksi barang bersama dan dijual ke pasar internasional.

Sejarah transformasi ASEAN memperlihatkan sekarang ini ASEAN lebih berorientasi pada masyarakat. Perjalanan dari 1967–2003 sebagai landasan *ASEAN Community* tidak terlepas dari peran negara-negara ASEAN termasuk

Indonesia. *ASEAN Community 2015* dicanangkan belum terlalu lama. Dalam konteks tiga pilar *ASEAN Community*, Indonesia sudah meratifikasi piagam ASEAN, sehingga sifatnya sudah mengikat secara hukum. Langkah berikutnya adalah bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi integrasi regional. Tantangan ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga negara lain di ASEAN terutama negara yang baru bergabung. Terdapat perbedaan sosial dan kesenjangan ekonomi yang sangat jelas di ASEAN. Indonesia ingin membangun negaranya sebagai negara yang sejahtera, tetapi juga harus berkomitmen untuk membangun kawasan.

Masyarakat cenderung mendengar nama ASEAN ketika ada konflik antarnegara, dibandingkan mendengar upaya-upaya ASEAN untuk mempererat persahabatan ataupun kerja sama di bidang-bidang pembangunan. Karena itulah ASEAN harus berorientasi pada masyarakat di seluruh lapisan agar semua kalangan dapat memetik manfaat positif dari integrasi ASEAN, yang merupakan visi perjalanan panjang 30 tahun, dari 1967–1997.

Dari sudut pandang internal, ketika Indonesia ikut serta dalam merumuskan berbagai *agreement* di ASEAN, ada tantangan bagaimana cara mengimplementasikannya di lingkup nasional. Perumusan dan implementasi *agreement* harus saling mendukung.

Di akhir seminar, digarisbawahi bahwa *ASEAN Community 2015* merupakan keputusan politik, yang Indonesia tidak dapat mundur namun harus maju dan siap untuk menghadapinya. Hal terpenting dari *ASEAN Community* adalah bagaimana agar seluruh lapisan masyarakat lebih memahami integrasi kawasan dan memperoleh manfaat positif, dan bagaimana menjadikan Indonesia unggul dalam berbagai bidang. Mengenai proses transformasi menuju *ASEAN Community*, diperlukan peran yang lebih aktif dari parlemen dan masyarakat. Sementara pihak pemerintah juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi.

Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer

Disamping penyelenggaraan seminar yang diluar dugaan mendapat sambutan yang baik dari berbagai kalangan, BKSAP juga ingin mendapatkan sumbangan pemikiran secara tertulis mengenai peran parlemen khususnya DPR RI dalam memaksimalkan perannya di kepemimpinan AIPA.



Untuk itu BKSAP menyelenggarakan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Populer dengan judul Peran Parlemen dalam Mewujudkan *ASEAN Community 2015*. Selain inisiatif DPR RI untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap organisasi ASEAN dan AIPA, lomba juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembentukan *ASEAN Community 2015* dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Dalam keterangan lomba disebutkan bahwa AIPA merupakan organisasi antarparlemen se-Asia Tenggara dengan misi khusus mendukung program kerja dan cita-cita *ASEAN Vision 2020* yang meliputi *ASEAN Community 2015* dan terdiri dari *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Political – Security Community*, dan *ASEAN Socio – Cultural Community*.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perkembangan di bidang politik memperlihatkan masih jauhnya pencapaian untuk mendukung terwujudnya integrasi politik di kawasan mengingat masih tidak meratanya demokratisasi di antara negara anggota ASEAN. Di bidang sosial budaya, masyarakat ASEAN masih belum memiliki *common identity* yang dapat menegaskan kebanggaan masyarakat ASEAN sebagai satu komunitas. Sedangkan di bidang keamanan, belum terdapat sistem pertahanan regional yang saling terintegrasi, baik dalam hal *soft security* maupun *hard security*. Sebagai bangsa yang besar, daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara cenderung stagnan sementara perekonomian dan pembangunan negara-negara lainnya di kawasan terus meningkat. Oleh karena itu, DPR RI memerlukan masukan mengenai strategi-strategi efektif yang dapat memberikan hasil yang konkret terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dari 68 karya tulis yang masuk, penulis terdiri dari: 56 laki-laki dan 12 perempuan dengan latar belakang delapan orang mahasiswa; 2 orang siswa SMU; 12 orang Dosen; 9 orang Akademisi; 1 orang PNS nondosen; 2 orang TNI; dan 34 orang dengan latar belakang lain-lain. Adapun peserta dari Jakarta berjumlah 11 orang, pulau Jawa 43 orang dan luar Jawa 13 orang. Merupakan suatu kebanggaan bahwa lomba tersebut mendapat respons yang baik dari berbagai kalangan.

Yang patut dikagumi dari berbagai tulisan yang masuk adalah upaya beberapa penulis untuk menulis sesuai dengan bidang yang dikuasai mereka, misalnya tulisan dengan judul “Optimalisasi Peran Parlemen dalam Mendorong Pembentukan *ASEAN Space Agency (ASA)* melalui Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh sebagai Sarana menuju Terwujudnya *ASEAN Community 2015*.” Si penulis, **Ria Casmi Arrsa**, mengandaikan bahwa

belajar dari pengalaman negara-negara Eropa membangun konsorsium dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh dalam *European Space Agency* (ESA) mungkin dapat dijadikan contoh dalam membangun hal yang sama di kawasan ASEAN. Terbentuknya *ASEAN Space Agency* (ASA) akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berpengaruh terhadap pembangunan dan kemandirian negara-negara di kawasan ASEAN. Karena ide yang menarik, walaupun tidak masuk dalam tiga pemenang, namun tulisan ini dimasukkan dalam kompilasi tulisan 13 besar lomba karya tulis.

Diluar berbagai ide yang menarik, sayangnya diperoleh juga kesan bahwa hanya segelintir yang memahami mengenai peran dan fungsi parlemen (baca DPR RI), dan dapat menggambarkan dengan tepat dalam tulisan. Tiga belas tulisan (13) dari 68 tulisan yang masuk patut diberi pujian. Walaupun hanya tiga orang yang berhak untuk mendapatkan hadiah, namun tulisan dari 13 orang tersebut dibukukan sebagai bagian dari sejarah selama DPR RI menjadi ketua AIPA 2011– 2012.

Dasar penetapan pemenang adalah gagasan yang disampaikan orisinal dan mengandung kebaruan serta memberikan kontribusi pemikiran yang merupakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di kawasan. Dengan dasar itu ditetapkan sebagai pemenang adalah **Faustinus Andrea, Wawan Fachrudin, dan Mohammad Faisal Karim**. Hadiah kepada para pemenang tersebut diberikan bersamaan dengan konferensi pers Ketua DPR RI dan Pimpinan BKSAP mengenai Penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok pada tanggal 13 September 2012 di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI. Khusus kepada pemenang pertama, hadiah tambahan adalah menghadiri Pembukaan Sidang Umum AIPA ke-33 yang diadakan di Kantor Gubernur NTB, pada tanggal 17 September 2012. Hadiah uang tunai yang diberikan kepada para pemenang adalah bagian dari hibah AIPA kepada Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA.

Website AIPA dan Twitter

Mengingat saat ini informasi sudah lebih dimudahkan melalui internet, BKSAP juga menyediakan laman khusus untuk AIPA di *website* DPR RI yang memberitakan segala aktivitas kegiatan AIPA. Khususnya pada saat berlangsungnya sidang, siaran langsung (*live streaming*)



dilaksanakan untuk meliputi jalannya Sidang *Assembly*, Sidang Komisi, dan dialog dengan para parlemen peninjau. Pada saat Sidang Umum di Lombok, tercatat pada bulan pelaksanaan ada sebanyak 2.760 kunjungan ke *website* AIPA. Angka yang menunjukkan animo cukup baik dari publik untuk mengetahui kegiatan AIPA. Untuk *Twitter*, harus diakui harus lebih diperbaiki lagi di masa mendatang dengan *update status* yang lebih *catching* untuk menarik *follower* yang lebih banyak lagi.

Film Dokumenter

BKSAP periode lalu, pada tahun 2009, telah membuat film dokumenter mengenai Diplomasi Parlemen yang dijalankan BKSAP. Saat ini untuk mengambil momentum kepemimpinan DPR RI di AIPA yang hanya akan berulang 10 tahun lagi, dibuat sebuah film pendek mengenai peran aktif DPR RI di AIPA. Film berdurasi tujuh menit tersebut juga akan digunakan sebagai sarana edukasi untuk pelajar yang secara rutin mengadakan kunjungan ke DPR RI. Film juga dijadikan bagian dari *civic education* untuk menjelaskan bagaimana DPR RI menjalankan diplomasi parlemen untuk melengkapi *first track diplomacy* yang dijalankan Pemerintah.

D. Kunjungan Kerja Presiden AIPA ke ASEAN Summit dan India, serta Lawatan ke Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam

ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives (ASEAN Summit) 3 April 2012 di Kamboja

Salah satu perkembangan positif dari kerja sama AIPA di level parlemen dengan ASEAN di level eksekutif adalah kesempatan kepada Presiden AIPA untuk menyampaikan pandangan Parlemen di *ASEAN Summit*, yang telah dimulai pada *ASEAN Summit* di Hanoi tahun 2010. Sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR RI menghadiri *ASEAN Summit* di Kamboja pada 3 April 2012. Selain itu telah diselenggarakan *ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives* di sela-sela KTT ASEAN ke -19 di Phnom Penh, Kamboja.

Pertemuan ini merupakan pertemuan resmi para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dengan Delegasi AIPA. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI menekankan bahwa kebijakan eksekutif yang dicapai di tingkat Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN harus disinergikan dengan pembahasan di berbagai pertemuan AIPA. Suksesnya implementasi dari perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang dibuat ASEAN juga akan membutuhkan kerja sama yang erat dan komitmen dari parlemen. Dalam kaitan dengan hal ini, peran AIPA dalam ASEAN harus diperkuat dan, jika diperlukan, dibutuhkan amandemen Piagam ASEAN pada Pasal 50 untuk penguatan dimensi parlemen di ASEAN.

Para Anggota Parlemen yang merupakan anggota AIPA adalah wakil rakyat yang dapat berkontribusi untuk mencapai ASEAN yang *'people-centred'* dan *'people-oriented'*,



yaitu ASEAN yang bertumpu atau berbasis pada rakyat dan masyarakat yang memiliki *sense of belonging* dan *sense of ownership* terhadap ASEAN. Tidak kalah pentingnya, perwujudan *people-to-people connectivity* di ASEAN dalam cetak biru pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bersama dan memperkecil gap kemakmuran di antara bangsa-bangsa ASEAN, demi memperkuat integritas ASEAN, dan *leverage* ASEAN dalam percaturan internasional.

Di depan para Kepala Negara ASEAN, Ketua DPR RI juga menekankan pentingnya dukungan sebagai *legislative branch* dari ASEAN supaya dapat berkontribusi secara signifikan dalam rangka kemajuan dan keberhasilan ASEAN.

AIPA Visit ke India

29 Juli s.d. 3 Agustus 2012

Pertemuan diadakan dengan:

- Ketua *Lok Sabha*, **H.E. Smt Meira Kumar**;
- Ketua Oposisi *Lok Sabha*, **H.E. Smt Sushma Swaraj**;
- *Minister of State of External Affairs*, **H.E. Mr. E Ahamed**, dan
- Presiden India, **H.E. Pranab Mukherjee**.

Pada saat penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-32 di Phnom Penh, Kamboja, dengan pijakan bahwa hubungan ASEAN – India memasuki tahun ke-20, Delegasi Parlemen negara *observer* dari India menyampaikan undangan kepada Presiden AIPA untuk Sidang Umum ke-33, yakni Ketua DPR RI **Dr. Marzuki Alie**, untuk berkunjung ke India pada 2012. Untuk memenuhi undangan tersebut, Ketua DPR RI memimpin delegasi yang terdiri dari Anggota Parlemen dari Indonesia, Singapura, Thailand, serta Vietnam dan mengadakan lawatan ke India pada tanggal 29 Juli s.d. 3 Agustus 2012.

Kunjungan ini juga dimaknai sebagai upaya mempererat hubungan antara ASEAN dan India yang terjalin dalam berbagai level, termasuk parlemen sebagai upaya mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan perayaan hubungan ke-20 tahun ASEAN – India, yang puncaknya akan digelar pada akhir tahun 2012 melalui *ASEAN – India Commemorative Summit* di India.

Pertemuan dengan Ketua Parlemen India *Lok Sabha* H.E. Smt Meira Kumar

Dalam pertemuan Delegasi AIPA dengan Ketua Parlemen India *Lok Sabha*, **H.E. Smt Meira Kumar**, Presiden AIPA mengapresiasi upaya India dalam menjaga stabilitas kawasan. India telah mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Selatan, disamping juga berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan konsultatif seperti *ASEAN – India Summit*, *ASEAN Regional Forum*, dan lain sebagainya. India juga bekerja sama dalam pembuatan *roadmap* kerja sama jangka panjang ASEAN – India yakni *ASEAN – India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity*, serta menandatangani *Joint Declaration for Cooperation in Combating Terrorism*.

Presiden AIPA menyatakan bahwa undangan kunjungan ke India tersebut menunjukkan potensi peningkatan kerja sama antarparlemen negara-negara ASEAN dan Parlemen India. AIPA mengekspresikan keinginan kuatnya untuk menjalin kerja sama secara konkret dengan tidak terbatas pada saling kunjung, tetapi juga tukar-menukar informasi mengenai pembelajaran dan praktik cerdas dan program lain seperti *capacity building* parlementer, seminar, dan lain sebagainya.

Pertemuan dengan Ketua Oposisi Parlemen *Lok Sabha* H.E. Smt Sushma Swaraj

Pertemuan dibuka dengan perbincangan informal mengenai sistem politik di India dan juga mengenai jumlah oposisi di Parlemen India. Ketua Oposisi Parlemen *Lok Sabha* dengan antusias menyampaikan mengenai sistem politik di India serta mengenai aliansi partai politik untuk menggalang kekuatan politik. Koalisi pertama adalah *National Democratic Alliance* (NDA) yang terdiri dari sekitar delapan partai politik termasuk partai yang menaungi Ketua Oposisi *Lok Sabha* yakni *Bharatiya Janata Party* (BJP) sementara koalisi/aliansi kedua adalah *United Progressive Alliance* (UPA) yang terdiri dari sekitar 10 pihak. UPA dipimpin oleh Sonia Gandhi yang juga Presiden dari Partai Kongres Nasional India. Terkait oposisi, BJP saat ini menjadi oposisi terbesar di Parlemen *Lok Sabha* dengan jumlah anggota 116 dari 543 orang Anggota Parlemen *Lok Sabha*. Presiden AIPA



selanjutnya mengapresiasi kepemimpinan **H.E. Sushma Swaraj** dalam oposisi di *Lok Sabha* dan mengharapkan kontribusi positif dalam perkembangan demokrasi.

Terkait ASEAN – India, **H.E. Sushma Swaraj** menandakan hubungan lebih erat pasti akan terus terjalin. India dan ASEAN terikat oleh rekam jejak sejarah dan kebudayaan yang sama. Dengan negara lain, kerja sama ekonomi dapat terjadi, tetapi dengan ASEAN, kerja sama perlu dilakukan menyeluruh termasuk di bidang budaya. **H.E. Sushma Swaraj** menegaskan bahwa India sudah semestinya tidak hanya menggaungkan kebijakan *Look East Policy*, tetapi sejatinya India telah berada di lokasi tersebut yakni *at East Policy*.

Pertemuan dengan *Minister of State of External Affairs* H.E. Mr. E Ahamed

Dalam pertemuan, **H.E. Mr. E Ahamed** mengungkapkan hubungan ASEAN – India telah berusia 20 tahun. Kemitraan yang terjadi merupakan kemitraan strategis yang dapat bermanfaat bagi masyarakat kedua kawasan. ASEAN dengan 600 juta jiwa, India dengan 1,2 miliar penduduk dengan gabungan PDB mencapai USD2,8 triliun memberikan potensi besar bagi kerja sama perekonomian ke depan. Dalam kesempatan tersebut, **H.E. Mr. E Ahamed** menyambut bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dijalin antara AIPA dengan kementeriannya.

“Seven social sins/tujuh dosa sosial yang didengungkan Mahatma Gandhi

- *Politics without principles*
- *Wealth without work*
- *Pleasure without conscience*
- *Knowledge without character*
- *Commerce without morality*
- *Science without humanity, and*
- *Worship without sacrifice*”

Pertemuan dengan Presiden India, H.E. Pranab Mukherjee

Dalam pertemuan dengan Presiden India, Ketua DPR RI menyampaikan apresiasi atas terpilihnya **H.E. Pranab Mukherjee** sebagai Presiden India. Delegasi AIPA juga merupakan delegasi asing pertama yang diterima oleh **Presiden Mukherjee** setelah pelantikannya. Ketua DPR RI yang juga Presiden AIPA menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia **H.E. Susilo Bambang Yudhoyono**. Presiden AIPA juga menyampaikan undangan kepada Presiden India dan Perdana Menteri India untuk menghadiri *Bali Democracy Forum* (BDF) di Bali, 8–9 November 2012. Dalam kerangka hubungan kemitraan ASEAN – India, dan *ASEAN – India Commemorative Summit*, AIPA mengharapkan adanya *output Vision Statement* yang menegaskan hubungan yang lebih mendalam antara ASEAN dan India.

Lawatan Presiden AIPA ke Malaysia, Singapura, Myanmar 24 s.d. 30 Juni 2012

Malaysia

Pertemuan dilaksanakan dengan Ketua Dewan Rakyat (DPR) Malaysia, **H.E. Yang Amat Berbahagia YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia** dan Ketua Dewan Negara, **H.E. YB Tan Sri Abu Zahar bin Dato' Nika Ujang**.

Pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat (DPR) Malaysia H.E. Yang Amat Berbahagia YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia

Berbagai isu dibahas dalam pertemuan ini. Berkenaan dengan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Ketua DPR RI mengharapkan Parlemen Malaysia agar mendorong pihak pemerintahnya untuk mengimplementasikan secara tegas prinsip-prinsip yang



tertuang dalam *Protocol Amandment MoU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006* yang telah ditandatangani pada tahun 2011. Ketua DPR RI menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya TKI yang meninggal di Malaysia. Ketua DPR RI mengharapkan Parlemen Malaysia dapat mendukung penyelesaian kasus-kasus tersebut atas nama hukum dan hak asasi manusia.

Sebagai respons terhadap isu *migrant workers* yang disampaikan Ketua DPR, Ketua Dewan Rakyat mengatakan bahwa ketika ada permasalahan dengan TKI Indonesia, pihak Malaysia tidak membesar-besarkan persoalan. Ketua Dewan Rakyat dalam kesempatan tersebut juga meminta agar pengadopsian budaya Indonesia oleh Malaysia dapat dimengerti oleh masyarakat Indonesia, dan jangan pula dibesar-besarkan. Jika dibesarkan, justru akan melebar ke ranah politik yang sebenarnya tidak diperlukan. Mengenai persoalan imigrasi, pihak Malaysia sudah bertekad untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia. Sifat-sifat negatif yang timbul seperti kejahatan yang dilakukan oleh TKI juga perlu diperhatikan. TKI ilegal jumlahnya mencapai jutaan di Malaysia. Malaysia berharap agar Delegasi Indonesia juga dapat membantu mencegah kedatangan TKI ilegal di Malaysia demi keselamatan semua pihak.

Ketua DPR RI menyampaikan kesepahaman mengenai hal tersebut. Mengenai isu *migrant workers*, Ketua DPR RI mendorong Parlemen Malaysia untuk merancang peraturan yang melindungi tenaga kerja asing. Hubungan baik dalam menangani tenaga kerja migran tentu dapat mempererat hubungan antarnegara ASEAN.

“ Misi Lawatan Presiden AIPA ke Negara-negara Anggota AIPA ”

1. Memberikan kepemimpinan yang kuat agar dapat memperjelas arah tujuan AIPA sebagai organisasi parlemen regional.
2. Meningkatkan hubungan antarmasyarakat ASEAN demi memupuk identitas ASEAN bersama yang saling menghormati dan mendukung sebagai suatu kesatuan masyarakat.
3. Membentuk sistem untuk mendorong implementasi yang maksimal dari resolusi-resolusi yang telah diadopsi AIPA.
4. Menjalin komunikasi yang efektif dan membentuk mekanisme kerja yang baik antara AIPA dan ASEAN.
5. Mendukung proses demokratisasi di kawasan, mengeliminir kesenjangan pertumbuhan ekonomi, penyelesaian konflik lintas batas serta tercapainya keseimbangan ekonomi diantara negara-negara anggota ASEAN.

Isu lainnya yang dibahas adalah pentingnya kerja sama dalam hal *joint food reserve* untuk memastikan *food security* selama masa bencana di kedua negara. Selanjutnya mengenai peran media, pihak Parlemen Malaysia memahami bahwa pers Indonesia memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi, namun Parlemen Malaysia menyarankan agar pihak Parlemen serta pejabat publik Indonesia lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan di media.

Pertemuan dengan Ketua Dewan Negara H.E. YB Tan Sri Abu Zahar bin Dato' Nika Ujang

Ketua Dewan Negara berpendapat bahwa hal terpenting di tingkat regional saat ini adalah kerja sama ekonomi, agar dapat berkompetisi di tingkat global. Terlepas dari berbagai persoalan bilateral, Indonesia dan Malaysia selalu bersatu di forum-forum internasional. *Indonesia is a force to be reckoned*, karena merupakan ekonomi yang sangat besar. Permasalahan bilateral sudah dapat diselesaikan dengan baik. Saat ini Indonesia sudah meningkatkan anggaran militernya sehingga dapat memperbarui alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia dan dapat berkontribusi untuk menjaga keamanan dan perdamaian di ASEAN. Diharapkan agar kerja sama militer antar-kedua negara dapat ditingkatkan agar menjadi negara yang disegani di tingkat internasional.

Singapura

Pertemuan dilaksanakan dengan:

- Menteri Transportasi merangkap Menteri Kedua Luar Negeri Singapura, **H.E. Mr. Lui Tuck Yew**;
- Ketua Parlemen Singapura, **H.E. Michael Palmer**; dan dengan
- Perdana Menteri Singapura, **H.E. Lee Hsien Loong**.



Pertemuan dan *Morning Tea* dengan Menteri Transportasi merangkap Menteri Kedua Luar Negeri Singapura

H.E. Mr. Lui Tuck Yew

Investasi Singapura di Indonesia tiga kali lipat lebih besar daripada investasi Amerika Serikat dan China. Hal ini menunjukkan betapa baiknya kinerja perekonomian dan juga potensi ekonomi Indonesia. Selama iklim investasi tetap baik dan ada kepastian kerangka legal, maka investasi akan selalu ada, termasuk dari Singapura.

Total nilai perdagangan Indonesia dan Singapura bertambah pesat, yaitu dari USD33 miliar menjadi USD44 miliar pada tahun lalu. Hubungan antar-pemerintah (*G to G*) dan hubungan bisnis sudah berlangsung dengan baik. Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah mempererat hubungan antarmasyarakat (*P to P relations*).

Sekarang ini sudah banyak penerbangan dari Singapura ke berbagai kota di Indonesia. Warga Singapura adalah kontributor wisatawan terbesar yang berkunjung ke Indonesia, demikian pula warga atau wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Singapura (diperkirakan mencapai 2,5 juta orang per tahun). Dalam bidang pendidikan, terdapat setidaknya 22 ribu warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Singapura, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Bahkan di Perguruan Tinggi SIM, mayoritas siswanya berasal dari Indonesia.

Mengenai persoalan sengketa perbatasan, tidak ada permusuhan atau ketegangan yang berarti diantara kedua negara, karena ada prinsip saling menghargai dan prinsip *mutual understanding*, terutama dalam penyelesaian perjanjian perbatasan di sebelah timur Selat Singapura.

***Courtesy Call* dengan Ketua Parlemen Singapura**

H.E. Michael Palmer

Mengenai isu-isu bilateral, Ketua DPR RI menyampaikan beberapa hal, diantaranya mengapresiasi pencapaian Singapura dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Ketua DPR RI mendukung usulan Presiden SBY

untuk mendiskusikan kembali perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang terhenti sejak 2007, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Hal ini diperlukan karena Singapura dianggap sebagai tempat pelarian para koruptor. Singapura yang bebas korupsi tentunya dapat berperan penting dalam memberantas korupsi di kawasan.

Ketua DPR RI mengapresiasi Singapura yang telah berupaya untuk melindungi TKI di Singapura. Dengan banyaknya jumlah TKI di Singapura, Ketua DPR RI mengharapkan agar Parlemen Singapura dapat membantu dan mendukung penyelesaian kasus-kasus yang dialami TKI dalam pekerjaannya serta menjunjung tinggi hak-hak mereka. Hal ini sangat penting karena perlakuan buruk yang dialami TKI dapat mengganggu keharmonisan hubungan kedua negara. Mengenai isu pekerja migran, Ketua Parlemen Singapura menyampaikan bahwa Singapura menindak dengan tegas para pemberi kerja yang melanggar peraturan.

Courtesy Call dengan Perdana Menteri Singapura H.E. Lee Hsien Loong

Mengenai isu-isu bilateral, Ketua DPR RI menyampaikan beberapa hal, diantaranya kembali menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan Indonesia menghargai Singapura sebagai negara yang bebas korupsi. Indonesia juga memiliki cita-cita yang sama, yaitu agar kawasan Asia Tenggara dapat bebas dari korupsi. Ada keinginan rakyat Indonesia agar perjanjian ekstradisi dan DCA (*Defense Cooperation Agreement*) dapat segera dibicarakan kembali dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pada tahun 2007, Parlemen Indonesia tidak menyetujui paket perjanjian yang dimaksud dikarenakan kaitannya dengan wilayah latihan keamanan. Pihak DPR RI mengharapkan respons positif dari Pemerintah Singapura mengenai hal ini demi peningkatan hubungan Indonesia – Singapura.

Diperlukan pula kerja sama yang lebih baik untuk mengatasi kejahatan lintas batas, terorisme, *trafficking in persons*, dan narkoba sehingga dapat dieliminasi, termasuk pula kasus korupsi dan pencucian uang sehingga tidak ada lagi ruang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan hal-hal yang merugikan.



DPR RI mendukung dibentuknya enam *working group* dalam bidang ekonomi untuk mencari inisiatif baru dalam peningkatan perekonomian melalui diversifikasi atau mempromosikan investasi di daerah-daerah lain di Indonesia dalam kerangka *Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI)*. Peningkatan hubungan dagang Indonesia dan Singapura luar biasa pesat, tetapi neraca perdagangan Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami defisit sampai dengan USD7 miliar. Ketua DPR RI berharap agar Singapura dapat membuat kebijakan untuk menyeimbangkan nilai perdagangan kedua negara. Upaya menciptakan *win-win solution* ini adalah salah satu solusi yang dapat diambil.

Mengenai kerja sama ekonomi khususnya investasi, **PM Lee** menyatakan bahwa sepanjang peraturan dan regulasi dapat berjalan dengan stabil, maka investasi dapat terpelihara dalam jangka panjang. Namun seringkali, yang terjadi dan dialami perusahaan Singapura di Indonesia tidaklah demikian, sehingga menimbulkan gejolak masyarakat dan dijadikan komoditas politik. **PM Lee** memberi jaminan bahwa pihak Singapura akan mendorong dan menjaga investasi tersebut.

Mengenai paket perjanjian ekstradisi dan DCA, keduanya sudah di bicarakan selama 20 tahun, termasuk tahun 2005. Singapura tetap konsisten dengan kepentingannya, yaitu perjanjian ekstradisi tanpa perjanjian DCA tidak dapat diterima. Tidak mungkin memberikan sesuatu ke negara lain tanpa timbal balik apapun. **PM Lee** berpendapat bahwa paket perjanjian tersebut *politically presentable*, dari pihak pemerintah Indonesia pun (Presiden SBY) sudah menyetujui hal tersebut. Sudah ada *special envoys* (utusan khusus) untuk menyelesaikan masalah ini. Singapura menyaksikan penandatanganan DCA dan *extradition treaty* di Istana Tampak Siring, Bali. Kemudian ada isu bahwa DPR RI mengajukan penolakan, maka Singapura mengesampingkan untuk sementara pembahasan perjanjian tersebut. **PM Lee** menambahkan bahwa tidaklah mudah untuk memulai kembali atau memisahkan kedua isu (perjanjian) tersebut. Menurut **PM Lee**, semakin kecil suatu negara, maka posisi perjanjian internasional semakin penting, sehingga Singapura pun sangat serius mempertimbangkan hal tersebut. Di luar daripada itu, kerja sama antarlembaga kedua negara sudah sangat baik, termasuk kerja sama antarpihak kepolisian serta *technical cooperation* dalam hal pertahanan dan keamanan.

Myanmar

Pertemuan dilaksanakan dengan:

- Presiden Republik Uni Myanmar, **U Thein Sein**;
- Ketua *Pyithu Hluttaw* (DPR), **Thura U Shwe Mann**; dan
- Ketua *Amyotha Hluttaw* (DPD) yang sekaligus menjabat Ketua *Pyidaungsu Hluttaw* (MPR) **U Khin Aung Myint**.

Courtesy Call dengan Presiden Myanmar H.E. U Thein Sein

Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah di kawasan. Selain Presiden Thein Sein, pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Investasi dan Ekonomi, Sekretariat Negara, Anggota Parlemen, serta Direktur Jenderal Hubungan Internasional.

Presiden Thein Sein mengucapkan terima kasih atas diskusi yang komprehensif, serta menyambut baik informasi yang diberikan oleh Presiden AIPA mengenai tujuan serta visi dan misi AIPA. Sebagai anggota permanen, Myanmar sekarang siap berkontribusi. Hubungan erat antar-negara-negara anggota AIPA akan berkontribusi positif pada pembentukan *ASEAN Community 2015*.

Ada dua prasyarat yang diperlukan agar demokrasi dapat berkembang, yaitu: stabilitas perdamaian dan keamanan, serta pembangunan ekonomi. Untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan, Myanmar kini melibatkan dan berdialog dengan Aung San Suu Kyi dan partai NLD untuk mencapai pandangan yang sama. Presiden Thein Sein telah membangun mekanisme politik dalam proses demokrasi, diantaranya dengan terdافتarnya kembali partai NLD dan pembebasan tahanan politik dari rezim sebelumnya. Partai NLD turut berpartisipasi dalam pemilu sela, Aung San Suu Kyi terpilih sebagai anggota parlemen dan akan ikut serta dalam masa sidang yang dimulai pada 4 Juli 2012.

Presiden memiliki tugas penting untuk menyatukan berbagai kelompok bersenjata dan membangun perdamaian di dalam negeri. Perlu dicapai kesepakatan dengan ke-11 kelompok pemberontak untuk mengembalikan perdamaian. Sebagai hasilnya, sekarang ini Myanmar relatif damai dan stabil.



Dalam hal pembangunan sosial-ekonomi, Presiden Thein Sein menyampaikan bahwa bukan hanya pembangunan ekonomi saja yang dibutuhkan Myanmar tetapi juga pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan ekonomi rakyat.

Mengenai masih diberlakukannya visa bagi warga ASEAN yang berkunjung ke Myanmar, memang di antara negara-negara ASEAN sudah saling menyetujui bebas visa untuk warga di kawasan. Tetapi karena kondisi setempat, Myanmar belum dapat menerapkan hal serupa walaupun sudah ada rencana untuk itu.

Pertemuan dengan Ketua *Pyithu Hluttaw*

H.E. U Thura Shwe Mann

H.E. Thura Shwe Mann mengucapkan terima kasih terhadap Indonesia atas dukungannya terhadap Myanmar di ASEAN maupun dalam isu-isu internasional. Beliau dengan senang hati mempelajari pengalaman pembangunan dan demokrasi di Indonesia.

Myanmar yang akan menjadi Presiden AIPA 2014 sekaligus menjadi tuan rumah KTT ASEAN akan memainkan peran penting dalam kesuksesan tiga pilar *ASEAN Community*. Merespons apa yang diminta oleh Ketua *Pyithu Hluttaw* agar Indonesia berbagi pengalaman dalam proses demokrasi, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia sekarang ini masih dalam proses konsolidasi dan reformasi, sementara Myanmar sedang dalam proses menuju demokrasi penuh. Indonesia dan Myanmar tentu saja dapat memainkan peran penting dan bersinergi, baik dalam kerangka bilateral maupun regional.

Pertemuan dengan Ketua *Pyidaungsu Hluttaw* dan *Amyotha Hluttaw*

H.E. U Khin Aung Myint

H.E. Khin Aung Myint menyambut hal-hal yang disampaikan oleh Presiden AIPA. Pada Sidang Umum AIPA di Kamboja, Myanmar telah menyampaikan usulan perubahan poin *ASEAN Charter* agar dapat lebih mendukung dan memperkuat peran AIPA di ASEAN, khususnya dalam pembentukan *ASEAN Community*. Hal

tersebut telah menimbulkan berbagai respons di kawasan. Perlu dimengerti bahwa penguatan peran AIPA perlu diakui secara resmi oleh ASEAN, bukan dalam Annex 2, tetapi sebaiknya di dalam Annex 1. Sebaiknya, para Kepala Negara ASEAN dan Ketua Parlemen negara-negara AIPA dapat saling bertemu secara formal agar dapat memberikan perkembangan konkret dalam perkembangan ASEAN secara menyeluruh.

Dalam *ASEAN Charter* disebutkan pentingnya hubungan antarmasyarakat, oleh karena itu hubungan tersebut perlu ditingkatkan. Mengenai AIPA, bukan saja AIPA dapat menjalin kerja sama lebih baik antarsesama negara ASEAN tetapi juga dengan parlemen di seluruh dunia.

Catatan dari Lawatan ke Malaysia, Singapura, dan Myanmar

Beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti dari lawatan tiga negara ini adalah adanya iktikad baik dari pihak Parlemen Malaysia mengenai penyelesaian perselisihan masyarakat kedua negara dalam bidang kesenian dan budaya, yang sempat muncul beberapa waktu yang lalu. Kiranya DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat menjembatani komunikasi antarmasyarakat Indonesia dengan pihak Malaysia guna meminimalkan kesalahpahaman.

Kemudian, melalui pertemuan bilateral baik antara Delegasi DPR RI dengan Perdana Menteri Singapura maupun Ketua Parlemen Singapura, dapat disimpulkan bahwa Singapura tetap pada pendiriannya untuk “menggabungkan” perjanjian ekstradisi dan perjanjian DCA dalam satu paket, sebagaimana telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Sebaiknya pihak Indonesia (DPR RI) mempelajari kembali isi kedua perjanjian tersebut agar negosiasi antara kedua negara dapat dilanjutkan.

Hal lain dari kunjungan ke Myanmar adalah untuk menarik investor Indonesia dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Myanmar. Ada baiknya apabila pihak Indonesia, khususnya DPR RI, mengkaji lebih lanjut mengenai potensi kerja sama ekonomi, investasi, dan perdagangan dengan Myanmar. Kesiapan infrastruktur dan demokratisasi Myanmar saat ini yang berhubungan erat dengan potensi kerja sama ekonomi patut diperhitungkan dengan seksama. Patut dijajaki



Foreign Investment Law yang dikeluarkan oleh Myanmar. Sehubungan dengan undangan yang disampaikan oleh Ketua DPR RI terhadap Ketua *Pyithu Hluttaw* (Parlemen Myanmar) untuk mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka mempelajari sistem pemerintahan dan proses demokrasi di Indonesia, DPR RI harus menindaklanjuti hal tersebut supaya tidak terkesan basa-basi belaka karena tampaknya Ketua *Pyidaungsu Hluttaw* serius meminta bantuan *capacity building* dari Parlemen Indonesia, misalnya melalui pelatihan dan *training* bagi Anggota Parlemen Myanmar. Ada baiknya apabila pihak DPR RI merespons hal tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam membantu proses pembangunan dan keberlangsungan demokrasi Myanmar.

Lawatan Presiden AIPA ke Vietnam, Thailand, dan Kamboja 4 s.d. 8 September 2012

Vietnam

Pertemuan dilakukan dengan Ketua Parlemen Vietnam, **H.E. Nguyen Sinh Hung** dan Perdana Menteri Republik Sosialis, **H.E. Nguyen Tan Dung**.

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Vietnam

H.E. Nguyen Sinh Hung

Hubungan yang harmonis dan erat antara Indonesia dan Vietnam perlu ditingkatkan, terutama pada sektor-sektor yang masih memiliki potensi besar dalam peningkatan kerja sama, diantaranya sektor investasi dan perdagangan, serta sektor kerja sama pariwisata. Untuk itu, Ketua DPR RI menyampaikan pandangan perlunya diadakan pertemuan oleh pejabat terkait dari kedua negara untuk mengevaluasi kesepakatan bilateral mana yang sudah berjalan memadai, kesepakatan yang belum berjalan, atau pula kesepakatan yang masih menghadapi hambatan. Langkah selanjutnya adalah perbaikan dan penyempurnaan terhadap berbagai kesepakatan yang masih mengalami kendala.

Dalam bidang kerja sama pertahanan dan keamanan, Ketua DPR RI menyampaikan rasa bahagianya bahwa kerja sama dalam bidang ini telah berlangsung cukup erat, dengan ditandai oleh banyaknya kunjungan delegasi militer dari tingkat menengah hingga panglima, pertukaran diklat perwira dan lainnya, seperti kehadiran masing-masing pejabat tinggi militer dalam beragam aktivitas kerja sama militer. Ketua DPR RI mengharapkan peningkatan hubungan yang semakin intensif diantara kedua negara di masa-masa yang akan datang, termasuk menyampaikan peluang potensi kerja sama dalam pengadaan alat persenjataan, di mana Indonesia telah memiliki industri alutsista (*primary weaponry system*) yang sangat memadai.

Pertemuan dengan Perdana Menteri Republik Sosialis H.E. Nguyen Tan Dung

Hal lain yang patut menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam adalah adanya peningkatan kerja sama perdagangan yang sangat berarti, hingga mencapai lebih dari 50% volume perdagangan dari tahun 2010–2011, dan bahkan menargetkan akan mencapai lebih dari USD5 millar pada tahun 2015 mendatang. Di bagian lain, Ketua DPR RI juga sempat mengangkat perlunya peningkatan hubungan antarmasyarakat (*people-to-people contact*) diantaranya melalui peningkatan kerja sama pariwisata, pertukaran beasiswa pelajar dan mahasiswa, pertukaran delegasi kesenian, dan lainnya.

Indonesia juga mengapresiasi capaian pertemuan kedua “Menuju Kemitraan Strategis RI – Vietnam” yang akan menjadi landasan bagi peningkatan hubungan yang lebih signifikan di antara kedua negara di masa yang akan datang.

Thailand

Pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand, **H.E. Yingluck Shinawatra**, dan Ketua Parlemen Kerajaan Thailand, **H.E. Somsak Kiatsuranont**.



Pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand

H.E. Yingluck Shinawatra

Pada pertemuan tersebut, Indonesia mengapresiasi kemampuan Pemerintah Thailand yang dapat mempertahankan statusnya sebagai salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia. Lebih dari 6,5 juta ton beras dapat diekspor ke luar negeri setiap tahunnya, di samping produk-produk agrikultur lain yang juga menjadi produk andalan Thailand. Keberhasilan Thailand dalam sektor pertanian ini menjadi alasan utama ketertarikan minat Parlemen Indonesia untuk mengambil pelajaran dan informasi dari tata kelola produksi dan distribusi beras nasional Thailand, serta produk-produk agrikultur andalan lainnya. Hal ini dirasakan penting karena Indonesia merupakan negara konsumen beras terbesar keempat di dunia, dengan konsumsi beras nasional mencapai 139 kg per kapita setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin besar, maka pertumbuhan kebutuhan beras pun akan terus meningkat setiap tahunnya.

Ketua DPR RI juga menyinggung perlunya peningkatan kerja sama bidang pariwisata di antara kedua negara. Thailand diakui sebagai salah satu tujuan wisata dunia yang populer, demikian pula dengan sebagian wilayah pariwisata di Indonesia (Bali, Lombok, Jakarta, Manado, Medan, dsb). Kerja sama antara kedua pihak akan saling menguntungkan dan akan membantu terciptanya pariwisata ASEAN yang tangguh. Kerja sama pariwisata kedua negara adalah upaya memperkuat hubungan yang harmonis secara bilateral, yang dilandasi oleh prinsip saling menguntungkan, saling pengertian, dan saling menghormati di antara kedua negara, terlebih dalam era global yang sudah tanpa batas negara (*borderless community*).

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Kerajaan Thailand

H.E. Somsak Kiatsuranont

Ketua Parlemen Thailand menjelaskan tentang kondisi pertanian di Thailand, yang menjadi prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara serius dalam implementasi pembangunannya. Bahkan, Ketua Parlemen Thailand juga memperkenalkan satu varietas baru tanaman padi dengan kualitas yang lebih bagus untuk ditawarkan kepada Indonesia.

Indonesia juga mengundang Thailand sebagai “*Country Coordinator ASEAN – China*” untuk berperan aktif dalam mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai, konsultatif, tanpa kekerasan (*non-violence*), serta atas dasar prinsip kesetaraan (*equality*) dan saling menghormati (*mutual respect*).

Kamboja

Pertemuan dilaksanakan dengan Ketua Parlemen Kerajaan Kamboja, **H.E. Heng Samrin** dan dengan Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, **H.E. Hun Sen**.

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Kerajaan Kamboja H.E. Heng Samrin

Dalam konteks kerja sama antarparlemen, Presiden AIPA ke-33 memandang Kamboja sebagai kekuatan penting yang dapat mendorong AIPA dan ASEAN menjadi lebih progresif dan dinamis. Hal ini didukung oleh fakta keberhasilan pembangunan ekonomi Kamboja yang terus mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pembangunan di kawasan. Disamping itu, kiprah aktif Kamboja dalam berbagai organisasi internasional turut berkontribusi menjadikan lingkungan ASEAN sebagai lingkungan yang dinamis-progresif.

Ketua DPR RI juga menyampaikan harapan agar hal-hal kerja sama yang lainnya, seperti kerja sama dalam bidang investasi Telkom di Kamboja, dan pembukaan jalur penerbangan langsung (*direct flight*) oleh maskapai Indonesia (Mandala dan Sriwijaya) dapat segera direalisasikan.

Pertemuan dengan Perdana Menteri Kerajaan Kamboja H.E. Hun Sen

Perdana Menteri Kamboja menyambut baik program kunjungan ASEAN yang dilakukan oleh Presiden AIPA ke-33 ke negara-negara anggota ASEAN, termasuk Kamboja.



Dalam konteks kerja sama bilateral, Ketua DPR RI berharap rencana lanjutan kerja sama antara kedua negara dalam bidang perdagangan beras, investasi Telkom di Kamboja, dan pembukaan jalur penerbangan langsung (*direct route*) oleh Maskapai Indonesia (Mandala dan Sriwijaya) dapat segera diimplementasikan. Dalam bidang perdagangan beras, kedua negara sudah menandatangani MoU pada bulan Agustus 2012 yang lalu, berupa komitmen penyediaan ekspor beras Kamboja ke Indonesia hingga mencapai 100.000 ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sedangkan Kamboja akan mengimpor pupuk dan peralatan pertanian dari Indonesia, sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan di antara kedua negara.

Pada tingkat kerja sama regional ASEAN, Presiden AIPA ke-33 mengharapkan agar Kamboja bersedia menerima program kerja sama dalam kerangka *the Second Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan*, tidak hanya pada pilar ekonomi namun juga pada pilar-pilar lainnya. Selanjutnya Presiden AIPA ke-33 menyampaikan undangan kepada **H.E. Hun Sen** selaku Ketua ASEAN untuk dapat memberikan sambutan atas nama ASEAN pada Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, Nusa Tenggara Barat – Indonesia pada tanggal 16 s.d. 22 September 2012. Pertemuan dengan tema “*Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015*,” merupakan forum yang baik bagi eksekutif untuk menyampaikan pandangan atas keinginan parlemen bekerja lebih erat lagi di lingkup ASEAN.

Presiden AIPA ke-33 mengharapkan agar Kamboja dapat mendorong ASEAN untuk berperan lebih aktif dalam menyediakan ruang-ruang konsultasi dan negosiasi yang bersifat konstruktif, solutif, efektif, dan strategis di antara pihak yang terlibat langsung dalam kerangka penyelesaian sengketa wilayah Laut China Selatan secara damai, tidak mempergunakan kekuatan militer, serta mengedepankan semangat kebersamaan antara ASEAN dan mitra ASEAN.

Dalam bagian responsnya, **H.E. Hun Sen** menyambut baik pandangan-pandangan Presiden AIPA ke-33 yang telah disampaikan, dan menjanjikan kehadiran di Sidang Umum AIPA. Namun dalam poin isu Laut China Selatan, **H.E. Hun Sen** berpandangan bahwa isu tersebut tidak perlu dimasukkan dalam agenda Sidang Umum AIPA ke-33, karena dianggap sebagai isu yang sensitif dan ada banyak agenda lain yang perlu menjadi prioritas.

Catatan dari Lawatan ke Thailand, Vietnam, dan Kamboja

Beberapa hal tentang rencana kerja sama bilateral yang masih tertahan, seperti kerja sama telekomunikasi (investasi Telkom) di Kamboja, pembukaan rute penerbangan langsung (Mandala dan Sriwijaya Airlines) Indonesia – Kamboja, finalisasi MoU tentang Perikanan antara Indonesia dan Thailand, perlu mendapat dorongan dari DPR RI kepada pihak otoritatif (eksekutif) yang relevan di Indonesia untuk percepatan implementasi komitmen-komitmen kerja sama tersebut. Di samping itu, DPR RI perlu menindaklanjuti untuk mendapatkan informasi terakhir terkait perkembangan rencana kerja sama tersebut.

Dari semua kunjungan, baik kepada Ketua Parlemen ketiga negara maupun kepada Perdana Menteri ketiga negara, delegasi DPR RI mendapatkan sambutan yang meriah, hangat, ramah dan juga banyak Anggota Dewan dari negara yang dikunjungi yang turut serta hadir. Untuk itu, perlu dilakukan pula, sebagai bentuk penghormatan yang sama, penyambutan yang setara seperti apa yang diterima oleh pihak delegasi DPR RI sewaktu melakukan Kunjungan ASEAN (*ASEAN Visit*) kepada ketiga negara tersebut (Vietnam, Thailand, dan Kamboja).

Dari semua komunikasi yang dilakukan dalam kunjungan ini, dirasakan bahwa semangat ke-ASEAN-an dari para Ketua Parlemen dan Perdana Menteri sangat kuat, sehingga hal tersebut dapat menjadi modalitas bagi pengembangan kerja sama bilateral yang lebih besar. Hal lain yang juga dapat menjadi kekuatan kohesivitas ASEAN adalah diplomasi seni-budaya, yang dikemas secara cerdas dan efektif dalam setiap kali kunjungan-kunjungan bilateral di antara kepala negara/kepala pemerintahan dan ketua-ketua parlemen.

Permasalahan Laut China Selatan merupakan persoalan yang sangat sensitif dan dirasakan kompleks oleh negara-negara yang dikunjungi, sehingga pendekatan Indonesia dalam turut serta mencari solusi efektif dan damai atas isu Laut China Selatan haruslah berupa *positive engagement*, suatu pendekatan konsultasi dan negosiasi yang berlangsung secara santun dan konstruktif.



E. Hasil Sidang AIFOCOM dan Sidang *Executive Committee*

Sidang AIPA *Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace* Yogyakarta, 16 s.d. 19 Juli 2012

Pada tahun 2001, Sidang Umum Parlemen Negara ASEAN membentuk *AIPO Fact Finding Committee (AIFOCOM)* untuk melihat kerangka hukum dan kebijakan yang ada di negara-negara ASEAN dan menghasilkan rekomendasi untuk inisiatif pembuatan undang-undangnya. AIFOCOM untuk Memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Lainnya dibentuk dengan tujuan tersebut, yaitu harmonisasi kerangka hukum mengatasi ancaman narkotika, dan saling mempelajari *best practices* dari negara-negara ASEAN. Selama ini Sidang AIFOCOM dilaksanakan oleh tuan rumah yang akan menyelenggarakan Sidang Umum AIPA.

Sidang *AIFOCOM to Combat the Drug Menace* yang diadakan di Yogyakarta adalah sidang yang kesembilan. Pada sidang tersebut, Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dengan membawa misi untuk mendukung visi negara-negara anggota AIPA dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja sama untuk memberantas perdagangan narkoba, untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya harmonisasi legislasi di bidang pemberantasan narkoba di negara-negara anggota ASEAN, serta untuk menerapkan komitmen Indonesia dalam upaya memberantas perdagangan gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Adapun Delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP, **Dr. Surahman Hidayat, MA** (F-PKS), dengan didampingi oleh Wakil Ketua

BKSAP, **Sidarto Danusubroto** (F-PD) dan **Andi Azhar Cakra Wijaya, SH** (F-PAN) serta Anggota BKSAP **Ir. Atte Sugandi, MM** (F-PD), **Evita Nursanty, M.Sc.** (F-PDIP), **Dr. Okky Asokawati, M.Si.** (F-PPP), dan **Rachel Maryam Sayidina** (F-PGerindra).

Ketua Delegasi DPR RI, **Dr. Surahman Hidayat, MA**, menyampaikan *Country Progress Report Indonesia* yang antara lain menyatakan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan berbagai deklarasi politik dan rencana aksi serta menjalin kerja sama internasional untuk melawan segala bentuk kejahatan narkoba nasional. Penanggulangan masalah narkoba nasional dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, sebuah badan penegak hukum independen. Untuk mencegah distribusi ilegal obat-obatan terlarang, Indonesia telah meratifikasi semua *UN Convention on Drug Control*, melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010, serta peraturan kementerian terkait lainnya. Ditambahkan pula bahwa usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memerangi masalah narkoba didukung penuh oleh DPR RI melalui legislasi dan anggaran. Hingga laporan ini diturunkan, tercatat DPR RI telah mengalokasikan anggaran sebesar satu miliar untuk mendukung program pemberantasan obat-obatan terlarang.

Sesuai aturan di AIFOCOM, seluruh parlemen anggota AIPA diminta menyampaikan *Country Progress Report on Drug Situation*. Pada sidang yang diselenggarakan DPR RI ini, tuan rumah berinisiatif untuk mengkompilasi *country progress report* tersebut dalam sebuah buku yang kemudian dibagikan pada seluruh Parlemen Anggota AIPA di Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok.

Pada sesi *Drafting Committee*, Sidang dipimpin oleh perwakilan Delegasi DPR RI, **Evita Nursanty, M.Sc.** Sidang membahas dua draf resolusi usulan Indonesia yaitu *Draft Resolution on the Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with the ASEAN Vision* dan *Draft Resolution on Establishment of Technical Working Group (TWG) of AIFOCOM*.

Sidang ke-9 *AIFOCOM to Combat the Drug Menace* telah menghasilkan dua resolusi usulan Indonesia yaitu *Resolution on the Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with ASEAN Vision* dan *Resolution on Establishment of Technical Working Group of AIFOCOM* untuk diadopsi pada Komisi Sosial dan Organisasi Sidang Umum AIPA ke-33. Pada *Resolution on the Role of Parliaments in*



Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with ASEAN Vision, AIFOCOM menetapkan sejumlah rencana aksi dalam pemberantasan narkoba seperti *Technical Working Group of AIFOCOM* dan *Task Force* di masing-masing parlemen, serta standarisasi format *AIFOCOM Country and Parliamentary Progress Report* sesuai format pelaporan tahunan (*country report*) yang dibuat atas usulan format dari Indonesia.

Disela-sela sidang, DPR RI mengajak para delegasi AIPA untuk melihat secara langsung fasilitas dan presentasi program beberapa pusat rehabilitasi narkoba yang ada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, DPR RI menyerahkan donasi kepada beberapa organisasi yang berperan dalam menanggulangi pecandu narkoba yakni Yayasan Al-Islami, Panti Sosial Pamardi Putra, Panti Rehabilitasi Kunci, Yayasan Charis dan RS Ghrasia.

Sidang Executive Committee **Yogyakarta, 16 s.d. 19 Juli 2012**

Dalam sejarah AIPA, Sidang *Executive Committee (Excom)* AIPA di Yogyakarta menjadi sidang *Excom* yang pertama kali dilaksanakan tiga bulan sebelum Sidang Umum, sesuai dengan yang tercantum dalam Statuta AIPA. DPR RI sebagai tuan rumah berpandangan bahwa hal ini perlu dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pendalaman dan pemahaman terhadap agenda dan berbagai isu yang akan diputuskan di Sidang Umum AIPA ke-33 yang akan diselenggarakan pada bulan September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tradisi mendalami dan lebih fokus pada berbagai isu bersama ini harus dimulai karena akan memengaruhi proses transformasi yang sedang dialami oleh AIPA bersama *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)* untuk mencapai terbentuknya *ASEAN Community* tahun 2015. Penyelenggaraan Sidang ini tidak menutup kemungkinan diadakan kembali Sidang *Excom* sebelum Sidang Umum AIPA ke-33 sebagaimana kebiasaan selama ini, untuk menampung isu-isu baru yang berkembang dan perlu dibahas dalam Sidang Umum ke-33 di Lombok.

Pada Sidang *Excom* di Yogyakarta, Ketua DPR RI menyampaikan laporan kegiatan sebagai Presiden AIPA dalam menghadiri beberapa sidang, seperti *The Sixth Ordinary Session of Pan African Parliament* di Addis Ababa,

Ethiopia, tanggal 16 s.d. 20 Januari 2012, dan *ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives* pada tanggal 3 April 2012 bertempat di Champei Room, Peace Palace, serta kunjungan ke tiga negara yakni Parlemen Malaysia, Singapura, dan Myanmar pada tanggal 24 s.d. 29 Juni 2012.

Sidang *Excom* akhirnya menyepakati agenda *items* dan *program of activities* Sidang Umum AIPA ke-33 pada bulan September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan tema “*Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015.*” Dan untuk memperluas komunikasi AIPA dengan organisasi-organisasi baik regional maupun internasional, Sidang *Excom* setuju untuk mengundang *Guest of the Host* yang hadir pada Sidang Umum AIPA ke-33 yaitu: Parlemen Timor Leste, *Pan African Parliament (PAP)*, *Secretary General of ASEAN*, *Secretary General of IPU*, *ASEAN Supreme Audit Institution (SAI)*, *ASEAN Wildlife Enforcement Network (WEN)/ARREST Program/Freeland Foundation*, dan *UN Special Adviser on the Prevention of Genocide*.



F. Capaian Sidang Umum AIPA ke-33

Sekilas Sidang Umum AIPA ke-33

Sidang Umum AIPA ke-33 yang berlangsung tanggal 16 s.d. 22 September 2012 di Lombok, Indonesia mengangkat tema “*Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015.*” Sidang dihadiri oleh tujuh Delegasi Parlemen Anggota AIPA yang dipimpin oleh Ketua Parlemen yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan Delegasi Parlemen Anggota AIPA lainnya yakni Vietnam, Filipina dan Myanmar, masing-masing dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen, *Chairman of Committee on Inter-Parliamentary Relations and Diplomacy*, dan *Chairman of the ASEAN Political-Security Community Committee Amyotha Hluttaw*. Hadir pula sembilan parlemen *observer*: Australia, Belarus, China, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, dan Uni Eropa; serta tujuh **Guest of the Host** yakni: Parlemen Timor Leste, *Pan African Parliament*, DPD RI, *ASEAN Supreme Audit Institution*, Sekretariat ASEAN, *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan *ASEAN Wildlife Enforcement Network/Freeland Foundation/ARREST*.

Dari soal kehadiran, Indonesia dapat berbangga hati karena tingginya kehadiran peserta, 317 orang, dan khususnya tingginya kehadiran anggota parlemen perempuan yaitu 25% dari total kehadiran anggota parlemen yang berjumlah 150 orang. Secara khusus surat undangan Ketua DPR RI kepada anggota AIPA memang menyebut supaya susunan delegasi memperhatikan proporsi gender.

Rangkaian Sidang Umum AIPA ke-33 terdiri dari Sidang *Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)*, Sidang *Executive Committee*, Sidang Pleno, Sidang-sidang Komisi (Politik,

Ekonomi, Sosial, dan Organisasi), Dialog dengan *Observer*, dan Sidang *Joint Communiqué*.

Sidang Umum AIPA ke-33 secara resmi dibuka malam hari tanggal 17 September 2012 di Aula Gedung Gubernur Nusa Tenggara Barat oleh Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie**, selaku Presiden AIPA. Pada Upacara Pembukaan tersebut, hadir pula Perdana Menteri Kamboja, **H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen**, selaku Ketua ASEAN, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, **Prof. Dr. Boediono**.

Dalam sambutannya, Presiden AIPA menyatakan bahwa tema Sidang Umum AIPA ke-33 “*Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015*” dipilih untuk menandai peran penting legislatif dalam proses transformasi ASEAN menuju integrasi ASEAN melalui pembentukan *ASEAN Community 2015*. Penting bagi AIPA untuk menyadari posisi dan perannya dalam memengaruhi proses transformasi ASEAN sehingga AIPA telah dan akan terus beradaptasi terhadap perkembangan ASEAN. Selain itu, beliau juga berbagi keprihatinan para pendahulunya tentang kebutuhan untuk mencari mekanisme efektif dalam mengimplementasikan resolusi-resolusi yang telah dihasilkan AIPA, terutama resolusi yang berhubungan langsung dengan transformasi ASEAN.

Perdana Menteri Kamboja sekaligus Ketua ASEAN, **H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen**, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ASEAN saat ini menghadapi banyak tantangan global maupun regional. Tantangan global antara lain pemulihan ekonomi yang rapuh dari negara-negara maju ditambah dengan krisis berkepanjangan di Eropa, kekacauan politik dan sosial di Timur Tengah dan Afrika Utara, kenaikan harga minyak, keamanan energi dan pangan, perubahan iklim, bencana alam, terorisme serta kejahatan lintas batas. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap ASEAN dan sebagai institusi perwakilan rakyat, AIPA juga dapat secara efektif menyampaikan pesan pada masyarakat tentang apa yang ASEAN telah lakukan untuk kepentingan kawasan dan menginspirasi semangat “*We Belonging to ASEAN.*”

Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), **Prof. Dr. Boediono**, dalam pidato yang sekaligus membuka sidang AIPA, menggarisbawahi peran penting AIPA sebagai institusi garis depan dalam menguatkan posisi ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi pada masyarakat. Para anggota parlemen, sebagai wakil dari konstituen mereka, dapat menyebarkan visi, misi, dan perkembangan ASEAN kepada konstituen mereka untuk menyolidkan integrasi ASEAN. Wapres RI juga menyatakan bahwa kunci



untuk mencapai tujuan bersama ASEAN adalah sinergi antar-komponen-komponen yang berbeda dalam ASEAN. Diharapkan bahwa hubungan dan kerja sama AIPA-ASEAN akan terus berkembang sebagaimana direfleksikan melalui pertemuan tahunan antara Delegasi AIPA dengan Pemimpin ASEAN pada *ASEAN Summit*.

Sidang *Women Parliamentarian of AIPA* (WAIPA) dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012, sebelum acara *Opening Ceremony* Sidang Umum AIPA ke-33, dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie**, selaku Presiden AIPA.

Mengingat ada agenda *item* yang harus direview kembali, Sidang *Emergency Executive Committee* diadakan pada pagi hari tanggal 18 September 2012. Pertemuan dihadiri seluruh Anggota AIPA. Sidang sepakat untuk mengubah agenda *item* "*Solution to South China Sea Problem*" menjadi "*Maintaining Peace and Stability in the Region*," dengan pertimbangan agar AIPA dapat mengambil peran sebagai pendorong pemerintahnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai.

Sidang Pleno Kedua Sidang Umum AIPA ke-33 dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012 yang membahas penyampaian *Report* dari masing-masing Ketua Komisi sekaligus mengesahkan Draf-draf Resolusi AIPA.

Pada kesempatan ini, Brunei Darussalam sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-34 AIPA mengumumkan Sidang akan diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 21 September 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Dalam Sidang Pleno ini, para Ketua Delegasi atau yang mewakili, menandatangani *Joint Communiqué* sebagai salah satu hasil penting Sidang Umum AIPA ke-33. Selanjutnya, dilakukan *Transfer of Office of AIPA President* yang ditandai dengan penyerahan Palu AIPA oleh Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie**, *the Outgoing of AIPA President* kepada perwakilan Ketua Parlemen Brunei Darussalam, **Hon. Mr. Pehin Dato Hj. Judin Hj. Asar**, selaku *the Incoming of AIPA President*.

Dalam pidato penutupannya, **Dr. Marzuki Alie** menyatakan bahwa setiap Sidang Umum AIPA merupakan kelanjutan dari awal *mile stone* yang 35 tahun lalu dengan penuh

keyakinan dimulai oleh para pendiri AIPA. Setelah 35 tahun, AIPA sekarang berada dalam semangat ASEAN yang terus berkembang secara dinamis. Persidangan dalam Sidang Umum AIPA dan berbagai aktivitas AIPA dari tahun ke tahun berproses untuk membawa AIPA ketahap yang semakin mendalami aspek-aspek berpengaruh terhadap penguatan solidaritas AIPA, sehingga dengan demikian akan mendukung proses transformasi dan integrasi ASEAN. Peran dan posisi AIPA akan semakin penting dan sangat ikut menentukan dinamika yang terus berkembang dalam ASEAN. Setiap resolusi yang diadopsi mencerminkan kuatnya *concern* AIPA dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan ini dan bagaimana melakukan pendekatan yang tepat untuk mengatasinya. Untuk menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan akan terus ada sejalan dengan dinamika interaksi kawasan, AIPA memerlukan peningkatan frekuensi dan kualitas komunikasi serta keterbukaan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebersamaan.

Ditengah-tengah rangkaian Sidang Umum AIPA ke-33, telah dilaksanakan beberapa acara sosial untuk menjamu Delegasi Sidang Umum AIPA ke-33 yakni:

- *Welcome Dinner* oleh Ketua BKSAP, **Dr. Surahman Hidayat, MA** pada tanggal 16 September 2012,
- Jamuan Makan Malam oleh Wakil Presiden RI, **Prof. Dr. Boediono** pada tanggal 17 September 2012,
- Jamuan Makan Malam oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, **Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi** pada tanggal 18 September 2012, dan
- Jamuan Makan Malam oleh Menteri Koperasi dan UKM, **Dr. Syarief Hasan** pada tanggal 19 September 2012.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi disuguhkan tari-tarian tradisional dari berbagai provinsi untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia.

Terakhir, sesuai kebiasaan AIPA, pada tanggal 20 September 2012 diadakan *excursion* untuk mengenalkan keindahan alam Lombok pada Delegasi yakni *Day Cruise Program* mengelilingi Selat Lombok dan makan siang di Pulau Gili Rengit.



Sidang Women of Parliamentarians of AIPA (WAIPA) Ketika Perempuan Parlemen Mendorong Percepatan MDGs

Sidang WAIPA dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012 mengawali seluruh rangkaian sidang di Sidang Umum AIPA ke-33. Sidang diikuti oleh 43 anggota parlemen perempuan dari seluruh anggota AIPA dan *observer*. Sidang diketuai oleh **Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.**, yang juga adalah *President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians IPU*. Delegasi Indonesia yang hadir adalah **Ida Ria Simamora (F PD)**, **Dra. Harbiah Salahuddin, M.Si. (FPG)**, **Evita Nursanty, M.Sc. (F PDIP)**, **Dra. Okky Asokawati, M.Si. (F PPP)** dan **Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si. (Hanura)**.

Dalam pidato membuka Sidang WAIPA, Presiden AIPA menyatakan kegembiraan akan meningkatnya angka partisipasi perempuan di parlemen, dan harapan agar hal ini terus meningkat. Isu-isu terkait perempuan di Asia Tenggara sangat kompleks dan oleh karenanya pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi perempuan. WAIPA mempunyai peran kritis dalam menguatkan demokrasi, partisipasi wanita dalam pembangunan sekaligus sosialisasi program-program ASEAN dan AIPA bagi seluruh masyarakat Asia Tenggara.

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. memimpin sidang yang membahas berbagai isu, dan pada akhir pertemuannya WAIPA sepakat pada beberapa hal penting antara lain bahwa perempuan parlemen memiliki peran penting dalam percepatan *Millenium Development Goals* (MDGs) mengingat sebagian pencapaian MDGs bersentuhan langsung dengan perhatian perempuan seperti kesehatan ibu dan anak.

Dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan di perdesaan, WAIPA juga menyepakati bahwa parlemen perlu mendorong pemerintah untuk menyediakan akses yang layak terhadap kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks kebijakan yang pro-perempuan didorong perlunya peningkatan kuantitas perempuan untuk duduk sebagai aktor kunci di tingkat pembuat keputusan dan kebijakan. Lebih jauh, untuk kedepan, WAIPA juga memandang penting untuk menginspirasi dan

memberdayakan perempuan muda dan memasukkan program pembangunan kapasitas pemuda dalam program kampanye.

Selain pertemuan WAIPA, dalam Sidang Umum AIPA ke-33 juga dirintis kolaborasi dengan *UN Women* dengan mengadakan *working lunch* dengan diisi presentasi yang mengintrodusir kebijakan yang pro-gender dalam legislasi.

Pesan Indonesia di Sidang Umum AIPA

Pidato Ketua Delegasi DPR RI di acara *debate* di Sidang Umum dibawakan oleh Wakil Ketua DPR RI, **Priyo Budi Santoso**. Dengan bahasa bak penyair, Wakil Ketua DPR membawakan pandangan Indonesia atas perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di kawasan Asia Tenggara dan kaitannya dengan kejadian-kejadian global. Dibawah ini adalah ringkasannya:

Indonesia mengamati sejak empat dasawarsa yang lalu, AIPA selalu berdiri tegak di garda terdepan sebagai mitra konstruktif ASEAN dalam meretas kawasan Asia Tenggara yang lebih damai dan sejahtera. Konsistensi peran dan upaya AIPA ini akan terus membahana dan melaju kencang di tengah gelombang tantangan kerja sama regional. Tak terkecuali pada Sidang Umum di Lombok pada September 2012 ini, kita tertantang untuk mengolah-usahakan solusi atas rangkaian masalah yang terbentang dari toleransi beragama, kejahatan pencucian uang, implementasi ekonomi hijau, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, penanganan bencana alam hingga peningkatan peran Anggota Parlemen Perempuan dalam membangun Asia Tenggara.

Merebaknya permasalahan tersebut merupakan simbolisasi dinamika perkembangan kawasan yang semakin bernilai krusial di kancah pergumulan diplomasi regional dan global. Hamparan kerja sama konkret dan bukan sekadar basa-basi menjadi sulaman yang harus terus dirajut tanpa terhalang oleh birokrasi elitisme yang melelahkan. AIPA harus sepenuhnya sadar inilah kunci utama untuk membuka gerbang *ASEAN Community* yang seharusnya kaya dengan partisipasi masyarakatnya.

Tantangan awal yang ada dihadapan kita saat ini adalah perihal toleransi beragama. Terdengar sangat simple dan mudah untuk dilakukan namun memerlukan kebesaran



hati untuk memahami perbedaan yang terbentang antara para pemeluk agama di dunia ini. Toleransi menjadi sangat mahal jika sebagian kelompok yakin secara absolut bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar diantara yang lain.

Contoh terkini dari penjabaran tentang toleransi beragama adalah kejadian yang mengejutkan kita semua yakni porak porandanya instabilitas keamanan di beberapa obyek diplomatik vital di kawasan Timur Tengah yang disulut oleh sebuah film provokatif bertemakan "*Innocence of Muslims*." Lautan demonstrasi pun tumpah di jalan utama kota-kota di Timur Tengah memprotes pelecehan dan penghinaan terhadap Islam yang mengatas namakan freedom of speech ini. Indonesia mengemukakan keras tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh produser film tersebut. Namun demikian, Indonesia menyerukan agar demonstrasi yang juga terjadi di beberapa negara-negara ASEAN supaya berjalan damai tanpa harus berujung dengan kekerasan sesuai dengan nilai-nilai perdamaian dan harmoni ASEAN yang selama ini terbangun kokoh.

Lain halnya dengan terkikisnya toleransi beragama, kita dibuat terperangah dengan merebaknya kejahatan pencucian uang dewasa ini. Sistem moneter dan perbankan yang semakin modern itu ternyata masih menyisakan celah bagi lahirnya praktik-praktik tidak terpuji ini. Kejahatan pencucian uang telah menggerus ekonomi negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu, Indonesia menghimbau Parlemen-parlemen Anggota AIPA untuk mengasah fungsi legislasi di dalam menyulam rezim anti-pencucian uang di masing-masing negara. Kemudian, institusi penegak hukum dan pengadilan juga diperkokoh untuk menopang kerja sama bilateral melalui implementasi perjanjian ekstradisi maupun *mutual legal assistance*. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN juga harus menjadi arsitek peraturan dan pengawasan yang dapat menangkal kejahatan kerah putih ini. Kita harus dapat menutup celah bagi praktik yang berpotensi mengoyak-oyak fondasi ekonomi kawasan ini.

Beranjak dari permasalahan pencucian uang, kelangkaan pangan dan ketimpangan pembangunan global yang terjadi dewasa ini bukanlah warisan yang ingin kita tinggalkan untuk anak cucu. Kita harus menyinsingkan lengan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan ekonomi dan sosial sekaligus meniti bumi yang ramah lingkungan. Disinilah AIPA tidak boleh abai terhadap pengembangan Ekonomi Hijau. Indonesia percaya bahwa Ekonomi Hijau adalah penyangga ekonomi untuk mengentaskan

kemiskinan dan menanam benih bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan. Bangunan Ekonomi Hijau ini tentu mensyaratkan dukungan keparlemen yang solid. Selain meretas penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Parlemen-parlemen Anggota AIPA memiliki tanggung jawab di pundak mereka untuk bernegosiasi dengan mitranya parlemen negara-negara maju agar merealisasi komitmen memberikan bantuan keuangan, riset, transfer teknologi dan pembangunan kapasitas berdasarkan kepada konsep *common-but-differentiated responsibilities*.

Jika Ekonomi Hijau dapat terealisasi, maka pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi di siang bolong. Melalui pengembangan bisnis berbasis Usaha Kecil dan Menengah yang kami yakini sebagai senjata ampuh di dalam membuka lapangan pekerjaan yang berhilir kepada pemerataan hasil ekonomi dan pembangunan di ASEAN.

Diakui bahwa tingkat pembangunan di negara-negara ASEAN sangat beragam. Indonesia berketetapan hati untuk mengajak seluruh Parlemen Anggota AIPA untuk menggemuruhkan ikhtiar kolektif untuk pencapaian *Millennium Development Goals* di tahun 2015. Meskipun target pencapaian ini sangat ambisius, namun harapan harus tetap berdiri kokoh. Indonesia merasa terhormat telah diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu ketua kolektif pada *The United Nations High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia akan menjadi ujung tombak dunia untuk meningkatkan pembangunan global pasca-target pencapaian MDGs. Untuk itu, dalam kesempatan ini, atas nama masyarakat Indonesia, meminta dukungan Parlemen dan pemerintah negara ASEAN untuk mensukseskan kerja *high level panel* ini.

Permasalahan lain yang menyeruak di kawasan adalah efektivitas manajemen penanggulangan bencana alam. Kita mafhum bahwa Kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. Untuk itu, bingkai kerja sama penanggulangan bencana alam yang telah kita rangkai baik di ASEAN maupun AIPA, perlu ditopang oleh kesadaran dan kesiapan masyarakat ASEAN terhadap ancaman bencana ini. Berkaca kepada kondisi ini, Indonesia mengajak AIPA untuk berikrar teguh mensosialisasi pemahaman pengurangan risiko bencana alam dan perubahan iklim menjadi bagian kurikulum sekolah di setiap tingkatan studi.



Bilik-bilik permasalahan kawasan dan solusi yang dihimpun tadi akan tersulam menjadi kerja konkret jika peranan penting para Anggota Parlemen Perempuan AIPA atau WAIPA diperkuat. Aktivitas fungsi parlemen dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran yang sesuai dengan upaya pengarusutamaan gender adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, sudah tentu Indonesia telah dan terus berikhtiar melapangkan jalan bagi penguatan peranan anggota parlemen AIPA di setiap untaian kerja sama kawasan.

Sidang Komisi Politik Menyatukan Pendapat yang Berseberangan

Sidang Umum AIPA ke-33 ini hanya membahas tiga agenda seperti yang ditetapkan oleh Sidang Komisi Eksekutif (*Executive Committee – Excom*) dua bulan sebelumnya pada Juli 2012 di Yogyakarta. *Pertama*, penguatan partisipasi masyarakat sipil untuk mendorong terwujudnya *ASEAN Community 2015*. *Kedua*, mencari solusi masalah Laut China Selatan, dan *ketiga*, *Report ASEAN Summit*.

Dibandingkan dengan komisi-komisi AIPA lainnya tiga agenda Komisi Politik tergolong sedikit karena agenda Komisi lain berjumlah lebih dari tiga. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi pada dasawarsa 1980, 1990, dan juga 2000. Pada waktu itu Komisi Politik memiliki agenda pembahasan yang cukup banyak sesuai dengan realitas politik yang tengah dihadapi di kawasan.

Saat ini, ketika kawasan Asia Tenggara jauh dari kondisi stabil dan aman atas berbagai ancaman eskalasi dan perang di periode pasca-Perang Dingin, sebetulnya diharapkan agenda pembahasan di Komisi Politik akan padat. Komisi Politik biasanya tidak hanya membahas masalah politik saja tetapi juga masalah-masalah keamanan kawasan. Kemudian juga, secara nyata di lapangan, dalam rentang waktu setahun (2011–2012) masa kepemimpinan Indonesia di AIPA, Laut China Selatan tengah bergolak akibat klaim mutlak dan manuver-manuver agresif angkatan perang Republik Rakyat China (RRC) di perairan tersebut. Klaim RRC kemudian diikuti pesaingnya, sesama pengklaim kedaulatan teritorial di Laut China Selatan.

Ini artinya, perang terbuka dapat pecah sewaktu-waktu, terutama mengingat sistem politik domestik masing-masing negara anggota ASEAN masih bermasalah dengan level

perbedaan yang mencolok. Kesenjangan politik yang besar terlihat dari negara yang sangat demokratis dan liberal -seperti Filipina-, dengan negara *emerging democracies* dan masih dibebani pekerjaan rumah untuk mewujudkan konsolidasi demokratis -seperti Indonesia dan Myanmar-, dengan yang semi-demokratis -seperti Malaysia dan Singapura-, serta dengan yang masih tertutup dan belum mempunyai mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara teratur.

Kondisi yang belum menggembirakan ini diperburuk oleh perkembangan pesimis mengenai penghormatan dan penegakan HAM di negara anggota AIPA. Makin tingginya ancaman aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dan pluralisme dalam masyarakat, termasuk yang alpa dari perlindungan pemerintah dan parlemen turut memperburuk kondisi yang ada.

Pada praktiknya, walaupun hanya terdapat dua resolusi yang dibahas, karena *Report* hanya berupa pembahasan tanpa *debate*, dinamika yang berlangsung pada gelar Sidang Komisi Politik begitu tinggi, bahkan dapat dikatakan menarik. Memang masih ditemukan hal-hal yang mengganggu seperti ketika peserta Sidang mempersoalkan hal-hal kecil yang seharusnya sudah harus diketahui sebelum mereka datang ke ruang Sidang. Menarik dikatakan mengingat beragam pihak dengan beragam kepentingan beradu pendapat dan pendapat tersebut harus dimenangkan. Sidang tidak boleh mengalami *deadlock* atau memenangkan salah satu pihak, tetapi semua pihak harus dengan kesepakatan bulat (konsensus) memutuskan atas nama Komisi Politik.

Tentu saja hal ini tidak mudah dijalani dan diatasi. Terutama ketika Pimpinan Sidang tidak memiliki kapasitas yang diperlukan dengan jam terbang tinggi dalam memimpin persidangan yang bersifat internasional. Untungnya delegasi tuan rumah yang ketuanya tengah dipercaya memimpin AIPA, memiliki **Hayono Isman** untuk memimpin sidang-sidang Komisi Politik.

Beliau cukup berpengalaman dalam menghadiri dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan forum internasional. Rasa percaya diri dan kontrol lapangan yang tinggi menjadi modal yang sangat menolong tidak hanya beliau tetapi juga Komisi Politik. Beliau dapat mengatasi keterbatasan kemampuan atau penguasaan pengetahuan dan bahasa yang sangat dibutuhkan dalam memimpin sidang yang sangat dinamis dan telah terpolarisasi sejak awal.



Intervensi Delegasi DPR RI yang terdiri dari **Evita Nursanty, M.Sc.** dan **Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si.** dari *floor* sangat mendukung kesuksesan Indonesia memimpin sidang. Kehadiran tim asistensi dari sistem pendukung internal DPR RI maupun Kemenlu juga sangat membantu dalam pemahaman materi dan dinamika yang berlangsung.

Selama rapat-rapat persiapan di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir, Komisi Politik memang tidak melakukan persiapan tersendiri selain persiapan yang dilakukan oleh keseluruhan anggota Grup Nasional Delegasi Parlemen DPR RI. Persiapan dilaksanakan sebelum Sidang Komisi Politik dengan berupaya memahami permasalahan dan dinamika yang berkembang di lapangan, termasuk pada saat-saat terakhir.

Ketua Komisi Politik, **Hayono Isman**, tidak *nervous* dalam membuka dan memimpin sidang walaupun ada ancaman terjadinya *deadlock*. Hal tersebut dikarenakan sanggahan dan resistensi berkepanjangan pimpinan delegasi Thailand yang menghendaki agar terminologi *Civil Society Organizations* (CSOs) tidak disamakan dengan *Non-Government Organizations* (NGOs).

Delegasi Thailand tampaknya trauma dengan peran agresif NGOs yang bisa menjungkalkan rezim politik di negerinya. Padahal jika menggunakan kamus istilah manapun, definisi CSOs dan NGOs setali tiga uang. Tidak ada gunanya mendebat terminologi CSOs yang tengah digunakan dalam resolusi penguatan peran masyarakat sipil untuk membumikan ASEAN/AIPA agar semakin dapat dirasakan denyut dan aktivitasnya di tingkat akar rumput.

Barulah, setelah dipakai rujukan dengan berpegangan pada *guideline* NGOs yang ada dalam buku pegangan ASEAN, yang kebetulan dibawa dan dipinjamkan oleh Deputi Pimpinan di Sekretariat Tetap ASEAN, Pimpinan Grup Nasional Delegasi Parlemen Thailand tidak melanjutkan bantahannya, dan dapat menerima. Apalagi setelah Ketua Sidang Komisi Politik, **Hayono Isman**, membacakan definisi terminologi CSOs atau NGOs dimaksud.

Dari sini Sidang Komisi Politik lancar mengalir hingga akhir. Hal ini ditandai dengan mudahnya Sang Ketua mengetuk palu setelah setiap pasal selanjutnya tidak mendapat pertanyaan, bantahan, ataupun resistensi sebagian, atau penolakan sama sekali.

Adapun draf resolusi yang dipakai sebagai bahan pembahasan di Komisi Politik ini adalah draf konsolidasi, yang merupakan hasil gabungan dari draf resolusi yang sebelumnya telah disusun Grup Nasional Delegasi Parlemen Indonesia, dengan draf revisi yang diusulkan oleh Grup Nasional Delegasi Parlemen Vietnam dan Grup Nasional Delegasi Parlemen Filipina.

Kedua draf tandingan asal Vietnam dan Filipina tidak ada yang istimewa, sebab masing-masing hanya berupaya memberikan koreksi gramatikal agar draf resolusi tersebut tampil lebih baik secara substansial dan menurut standar ketatabahasaan. Draft usulan kedua negara, selain tampak lebih detil, juga cenderung memperlihatkan pemborosan kata-kata dan tampak terlalu banyak halamannya serta bertele-tele untuk sebuah draf resolusi politik.

Hal yang sama dialami oleh draf resolusi masalah Laut China Selatan. Saran perbaikan cenderung direspons dengan pembuatan lebih banyak klausul, sekalipun dengan kalimat yang lebih pendek daripada yang sebelumnya digunakan dalam usulan draf resolusi asal Indonesia.

Dalam pembahasan masalah Laut China Selatan, sidang Komisi Politik mengalami perdebatan yang alot dalam pembuatan resolusi. Titik temu dapat dicapai setelah debat berkepanjangan antara dua kubu yang pro dan kontra terhadap dipakainya penyebutan Laut China Selatan dalam resolusi baru.

Kubu yang pro adalah Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Sedangkan kubu yang kontra adalah Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kelompok yang terakhir ini tampaknya berada dalam pengaruh hegemoni dan kontrol kepentingan politik yang kuat dari negara besar RRC. Terlebih mengingat mereka bukan merupakan negara pengklaim kedaulatan teritorial di Laut China Selatan.

Sedangkan kelompok pertama berupaya mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing di Laut China Selatan yang mereka klaim. Indonesia sendiri sebagai sebuah negara kepulauan sebetulnya memiliki kepentingan nasional atas solusi masalah Laut China Selatan yang tunduk pada *the United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Tetapi, posisi Indonesia sebagai *host country* Sidang Umum AIPA ke-33 membuat Ketua Komisi Politiknya, **Hayono Isman**, harus dapat berada di tengah-tengah dan mampu memperlihatkan sikap moderatnya. Sikap tersebut membuat setiap delegasi yang hadir dan berpartisipasi dalam sidang Komisi Politik merasa nyaman.



Dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan sikap yang pasti, walaupun tetap terbuka pada upaya negosiasi dan diplomasi, akhirnya Sidang Komisi Politik dapat diselesaikan secara tuntas. Kesepakatan yang dicapai dengan konsensus bulat terdiri atas dua draf resolusi mengenai penguatan peran masyarakat sipil untuk terwujudnya *ASEAN Community 2015* dan solusi mengatasi masalah keamanan dan stabilitas di kawasan yang harus mengacu pada *the Six Principles on the South China Sea*.

Tidak aneh, apabila Komisi Politik AIPA dengan pembahasan draf resolusi yang sedikit ini ternyata baru menyelesaikan secara tuntas sidangnya paling akhir mengingat hangatnyanya perdebatan. Sementara, komisi-komisi AIPA lain, seperti Komisi Ekonomi dan Komisi Sosial yang mempunyai agenda pembahasan yang banyak --lebih dari dua draf resolusi-- dapat menyelesaikan sidang-sidangnya tepat waktu.

Sidang Komisi Ekonomi Telaah Kata demi Kata

Komisi Ekonomi pada Sidang Umum AIPA ke-33 kali ini, dipimpin oleh **Drs. Helmy Fauzi**, membahas beberapa topik yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kawasan. Topik pembahasan seperti pencucian uang, *green economy*, pemberantasan kemiskinan hingga akses yang lebih baik untuk para pelaku usaha kecil menengah (UKM) merupakan isu-isu yang bersinggungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam isu pencucian uang, sekilas bila melihat dari wilayah kebijakannya pemberantasannya, isu ini lebih cocok dibahas dalam Komisi Politik. Namun demikian, jangan pula dilupakan bila aktivitas pencucian uang, mulai dari penempatannya (*placement*), pemindahan uang, penyembunyian hingga pemutusan uang dari sumber kejahatannya (*layering*), termasuk juga mengintegrasikannya ke dalam hal yang bersih (*integration*) melibatkan aktivitas ekonomi dan yang terutama institusi dan sistem ekonomi.

Hal ini disadari dengan betul oleh Pimpinan BKSAP sehingga melalui Wakil Ketua BKSAP, **Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH**, usulan mengenai pencucian uang ini dimasukkan dalam Sidang Komisi Ekonomi. Pada akhirnya, usulan Indonesia ini, disepakati dalam Sidang *Excom* yang digelar di Yogyakarta, akhir Juli 2012.

Topik lengkap yang disepakati dalam Sidang *Excom* dan kemudian dibahas lebih lanjut adalah:

- 1) *Enhancing Regional Efforts and Cooperation against Money Laundering;*
- 2) *Creating a Green Economy in the Context of Sustainable Development;*
- 3) *Adopting Strategies for Poverty Eradication and an Institutional Framework for Sustainable Development;*
- 4) *Ensuring Better Access to Technology, Market and especially Financing, such as Internationally-funded Programs through Regional Programs for Small and Medium Enterprises (SMEs).*

Mengingat Indonesia menjadi tuan rumah, maka, keleluasaan dalam menyusun *zero* draf resolusi yang biasanya menjadi kehormatan tuan rumah tidak disia-siakan begitu saja oleh Delegasi Indonesia. BKSAP bersama tim pendamping bekerja menyusun secara komprehensif keempat draf resolusi tersebut dengan acuan dan prinsip keseimbangan kepentingan nasional dan regional kawasan.

Untuk mempermudah dan memperlancar pembahasan dalam Sidang Komisi Ekonomi, Delegasi memutuskan untuk mengirim *zero* draf resolusi tersebut beberapa pekan sebelum penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-33 digelar dengan harapan ada masukan, amandemen dan tanggapan dari seluruh delegasi peserta sidang untuk kemudian dikonsolidasikan dalam draf terbaru. Draft terakhir yang dipaparkan kepada peserta sidang tentunya adalah draft terakhir yang telah disesuaikan dengan masukan delegasi lainnya sebelum sidang.

Kendati demikian, pembahasan ke-empat topik ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal positif yang dapat ditarik dari persidangan Komisi ini adalah telaah yang dilakukan sangat detil bahkan hingga kata per kata. Delegasi dari Malaysia dan Kamboja terlihat aktif dalam melakukan telaah kata per kata ini.

Meskipun, dalam beberapa isu tertentu, ada delegasi yang menunjukkan ketidapahamannya terhadap draf resolusi yang diajukan Indonesia seperti dalam draf resolusi terkait pencucian uang. Delegasi Vietnam, sempat menanyakan mengenai eksistensi *Southeast Asian Parliamentarians against Corruption* (SEAPAC) mengingat Vietnam belum mengetahui organisasi tersebut.

SEAPAC merupakan organisasi di bawah *Global Organization of Parliamentarians against Corruption* (GOPAC) yang saat ini beranggotakan parlemen dari kawasan



Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina adalah pionir dalam organisasi ini. Karena belum mengetahui, Vietnam terkesan ingin mengganjal klausul yang menerangkan perlunya peningkatan keterlibatan anggota parlemen dalam organisasi seperti SEAPAC dan lainnya. Namun, setelah mengulik informasi dari internet, Vietnam kemudian tidak mempermasalahkannya.

Vietnam juga kembali mempertanyakan pilihan kata *backbone* dalam isu SMEs (UKM) yang menandakan UKM merupakan tulang punggung ekonomi kawasan Asia Tenggara. Sempat muncul perdebatan mengenai hal ini, mengingat Singapura, Filipina dan sejumlah negara lain sepakat dengan kata *backbone*. Istilah *backbone* merupakan istilah umum yang biasa digunakan di level ASEAN ketika berbicara soal UKM. Namun demikian, Ketua Sidang Komisi Ekonomi, **Drs. Helmy Fauzy**, yang memimpin jalannya persidangan, mengakomodasi masukan Vietnam dengan mengganti *backbone* menjadi *important engine of economy* yang memiliki makna kurang lebih sama.

Telaah kata demi kata memang menarik untuk disimak. Tetapi pembahasan tersebut kadang menegaskan substansi yang akan dicapai dalam pembahasan. Untuk itu, sesekali pula, dengan kesan santai, **Drs. Helmy Fauzy** menegaskan pilihan diksi kalimat yang sebelumnya diperdebatkan.

Delegasi Indonesia yang diwakili **Dr. Muhammad Firdaus** dan **Emil Abeng** terlihat akomodatif menampung seluruh masukan delegasi lainnya. *Wait and see* dilakukan dengan pertimbangan seluruh draf resolusi merupakan usulan Indonesia.

Pada akhirnya, para delegasi menyepakati draf resolusi yang seluruh substansinya diajukan oleh Delegasi Indonesia. Delegasi Malaysia memberikan catatan bahwa seluruh draf resolusi sebelum diajukan sebaiknya dikelola dengan baik oleh ahli bahasa sehingga mengurangi perdebatan kata demi kata yang dilakukan.

Meski masukan tersebut menjadi catatan, menarik untuk disimak bahwa kadangkala pembahasan tata bahasa/*grammar* yang mencuat terjadi karena perbedaan gaya bahasa dari masing-masing delegasi. Bahkan tak jarang beberapa delegasi memperdebatkan tata bahasa yang sebelumnya telah mereka revisi sendiri dalam kesempatan sidang yang sama.

Sidang Komisi Sosial Kesepakatan Regional dalam Manajemen Risiko Bencana dan Pelestarian Lingkungan

Sidang Komisi Sosial diselenggarakan dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke-33 yang diadakan pada tanggal 16 s.d. 22 September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sidang tersebut membahas beberapa agenda yang menjadi kepentingan masyarakat ASEAN secara luas, seperti partisipasi publik dalam penanganan risiko bencana serta pentingnya pengimplementasian teknologi ramah lingkungan demi mendukung upaya pelestarian lingkungan di kawasan.

Sehubungan dengan isu manajemen risiko bencana, **Ir. Atte Sugandi, MM**, anggota BKSAP DPR RI yang berperan sebagai Ketua Sidang Komisi Sosial menekankan beberapa hal sehubungan dengan bencana alam, yaitu bahwa selama satu dekade terakhir, terdapat peningkatan aktivitas geologis dan vulkanis yang menyebabkan timbulnya berbagai bencana alam di tingkat regional maupun global. Jumlah kejadian bencana alam pun semakin bertambah dan risiko dari timbulnya bencana alam juga diperparah oleh kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrem. Risiko tersebut semakin meningkat akibat degradasi lingkungan dan kurangnya kapabilitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan kurangnya pengetahuan untuk meminimalisir dampak risiko bencana. Bencana alam akan secara langsung memengaruhi masyarakat, menimbulkan kerugian baik materiil maupun nonmateriil. Bencana alam yang bersifat masif juga menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan dan akibat atau dampak dari bencana dapat meningkatkan kesenjangan sosial-ekonomi antarmasyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai dukungan AIPA terhadap upaya pengurangan risiko bencana, Sidang Komisi Sosial menyepakati sebuah resolusi mengenai *“Enhancing Public Awareness and Promoting Public Participation in Programs Related to Disaster Risk Reduction and Emergency Response to Promote Community Resilience to Disasters.”*

Sebelum diselenggarakannya Sidang Komisi Sosial, BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR RI telah mendistribusikan rancangan resolusi tersebut ke seluruh Delegasi AIPA guna mendapatkan masukan dari Delegasi lainnya. Jumlah masukan yang diterima oleh BKSAP pada saat



itu tidak terlalu signifikan, namun saat Sidang Komisi Sosial berlangsung, banyak masukan-masukan yang terkonsolidasikan, yang pada intinya tidak mengubah usulan Indonesia, melainkan memperkaya substansinya.

Resolusi tersebut mengakomodasi beberapa hal, diantaranya mendorong partisipasi publik dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui diseminasi informasi bencana dalam kurikulum pendidikan. Para delegasi juga menyetujui pentingnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Secara khusus, **Ida Ria Simamora**, mewakili Delegasi Indonesia, menekankan pentingnya menghargai kearifan lokal sebagai bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan, adaptasi, dan mitigasi bencana. Delegasi Indonesia yang mengusulkan draf resolusi tersebut dengan sigap selalu berupaya untuk menjelaskan poin-poin dan argumentasi penting yang berkaitan dengan pasal-pasal resolusi terkait. Para Delegasi AIPA juga mendorong adanya kerja sama dan solidaritas regional yang lebih erat, terutama untuk saling bahu-membahu dalam meminimalkan risiko bencana. Resolusi tersebut juga sangat menekankan pentingnya peran media massa dalam menjembatani dan menyalurkan informasi bencana ke masyarakat secara luas.

Agenda penting lainnya yang dibahas dalam Sidang Komisi Sosial berkaitan dengan *green-technology*. **Ir. Atte Sugandi, MM** menekankan bahwa manusia adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap eskalasi bencana alam di berbagai belahan dunia. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa mengindahkan stabilitas ekosistem dan lingkungan. Industrialisasi dan urbanisasi yang tidak terkontrol juga mempercepat peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Dalam upaya mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan haruslah memberikan kontribusi. Kepentingan ekonomi dari para pelaku industri harus diimbangi pula dengan upaya pelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi yang ramah lingkungan.

Dukungan para Delegasi AIPA dalam mendorong transfer *green technology* tertuang dalam Resolusi mengenai “*Promoting the Development and Transfer of Low-Carbon and other Environment-Friendly Technology Research.*” Dalam pembahasan resolusi kali ini, tidak terdapat banyak perubahan substansial dari draf awal yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia. Resolusi tersebut mengakomodasi beberapa hal penting, diantaranya mendorong parlemen

negara-negara anggota AIPA untuk menyusun regulasi yang terkait dengan transfer teknologi serta mendorong partisipasi publik dalam pengimplementasian kebijakan terkait dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. AIPA melalui Sidang Komisi Sosial juga mendukung peningkatan kegiatan *research and development* dalam mengeksplorasi sumber energi terbarukan serta mempromosikan penggunaan energi secara efisien.

Sebagaimana yang terjadi dalam pembahasan agenda sebelumnya, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh **Ida Ria Simamora** dan **Harun Al Rasyid** selalu menampung berbagai masukan yang diterima selama sidang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa kedua resolusi yang dibahas dalam Sidang Komisi Sosial telah mengakomodasi berbagai kepentingan dari negara-negara anggota AIPA.

Ir. Atte Sugandi, MM sebagai Ketua Sidang Komisi Sosial sangat memahami pentingnya peran serta anggota parlemen dalam meningkatkan kapasitas konstituen mereka masing-masing, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang rentan terhadap bencana. Risiko yang disebabkan oleh bencana alam juga bersifat lintas batas negara, sehingga seluruh elemen masyarakat ASEAN harus berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Sebagai tuan rumah dari Sidang Umum AIPA ke-33, Indonesia sebelumnya juga telah menyelenggarakan Sidang *Excom* dan Sidang *AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace* (AIFOCOM) ke-9 di Yogyakarta pada bulan Juli 2012. Indonesia dalam Sidang AIFOCOM mengusulkan dan “menggolkan” dua buah rancangan resolusi yaitu yang pertama, “*Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with ASEAN Vision*” dan yang kedua, “*Establishment of Technical Working Group of AIFOCOM.*” Kedua resolusi tersebut disahkan dalam Sidang Komisi Sosial AIPA yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sidang Komisi Organisasi Debat mengenai Internal Organisasi

Komisi Organisasi pada Sidang Umum ke-33 membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi seperti Laporan Tahunan, Laporan Acara-Acara Tahunan



yaitu *AIPA Caucus*, dan Penggunaan Anggaran. Topik khusus yang turut dibahas dalam Komisi Organisasi adalah mengenai beberapa proposal kerja sama yaitu dengan *ASEAN-Wildlife Enforcement Network and Freeland Foundation*, dengan *ASEAN Foundation*, dan dengan *Pan African Parliament*. **Dr. Surahman Hidayat, MA** memimpin sidang ini dan Anggota Delegasi dari Indonesia yang ikut mengawal agenda dari *floor* adalah **H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH**.

Dalam pembicaraan mengenai Laporan Tahunan Sekretariat AIPA, seluruh anggota AIPA menyetujui isi dari laporan yang disampaikan kepada Forum. Namun, dalam hal Proposal atas Anggaran Periode 1 Oktober 2012 s.d. 30 September 2013 muncul beberapa kritik dari beberapa Anggota AIPA. Pasalnya terdapat kenaikan sebesar USD83,162.50 yang diajukan oleh Sekretariat Tetap AIPA. Beberapa negara Anggota meminta agar Sekretariat Jendral dapat mengatur pengeluaran dengan bijaksana dan berusaha agar setiap biaya sesuai dengan anggaran yang ditentukan.

Diskusi yang menarik juga terjadi saat menentukan jangka waktu tugas Sekretaris Jenderal AIPA saat ini. Statuta AIPA telah menentukan bahwa periode masa kerja seorang Sekretaris Jenderal adalah tiga tahun. Sekretaris Jenderal saat ini, **Mr. Antonio V. Cuenco**, tidak diangkat pada saat Sidang Umum AIPA, melainkan pada bulan Februari 2010, karena menggantikan Sekretaris Jenderal terdahulu yang wafat. Sekretaris Jenderal **Antonio V. Cuenco** mengajukan pilihan kepada forum agar jabatan dirinya diperpanjang hingga Sidang Umum selanjutnya. Namun pada akhirnya diputuskan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, masa jabatan Sekretaris Jenderal adalah tiga tahun, maka jabatan **Antonio V. Cuenco** akan berakhir pada Februari 2013. Forum meminta agar Singapura segera menominasikan Sekretaris Jenderal selanjutnya agar dapat memulai tugasnya pada bulan Maret 2013.

Sesuai hasil pertemuan AIFOCOM di Yogyakarta pada bulan Juli lalu, diputuskan bahwa akan dibentuk suatu *Technical Working Group* (TWG) yang menjalankan mandat membantu AIFOCOM menjalankan tugasnya dalam menghapuskan obat-obatan ilegal dari kawasan serta turut merealisasikan *Drug Free ASEAN 2015*. Dalam Forum sempat dipertanyakan mengenai dampak tambahan biaya yang ditimbulkan dengan adanya TWG ini karena tentunya grup ini harus mengadakan pertemuan-pertemuan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, hal itu sebenarnya telah difasilitasi dalam resolusi dan lampirannya mengenai pendirian TWG yang disetujui di Yogyakarta, yaitu bahwa segala biaya atas pertemuan TWG akan menjadi beban

negara tuan rumah, sedangkan masing-masing negara anggota akan mengeluarkan biaya atas perjalanan masing-masing delegasi.

Hal penting lain yang dibahas pada Sidang Komisi Organisasi adalah menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-34. Forum menyepakati bahwa Sidang Umum AIPA selanjutnya akan diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada tanggal 15 s.d. 21 September 2013.

Komite Organisasi menutup sidangnya dengan mengadopsi resolusi mengenai apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepemimpinan **H.E. Dr. Marzuki Alie** selama setahun terakhir yang memberikan ide-ide dan gagasan baru untuk perbaikan AIPA kedepan.

Komite Organisasi menutup sidangnya dengan mengadopsi resolusi mengenai apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepemimpinan H.E. Dr. Marzuki Alie selama setahun terakhir yang memberikan ide-ide dan gagasan baru untuk perbaikan AIPA kedepan.

Dialog dengan Parlemen Observer

Efektivitas keberadaan AIPA sebagai entitas yang terkait dengan ASEAN dibuktikan juga dengan pengakuan kalangan internasional terhadap organisasi tersebut. Sejalan dengan eksistensi AIPA, saat ini organisasi parlemen di ASEAN tersebut memiliki 10 parlemen negara *observer* yakni parlemen dari Australia, Belarus, China, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Papua Nugini, Rusia, dan Uni Eropa.

Pada Sidang Umum ke-33, AIPA menyambut baik sembilan dari 10 parlemen negara *observer*, yaitu parlemen dari Australia, Belarus, China, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, dan Uni Eropa. Anggota Delegasi DPR RI memimpin kesembilan pertemuan yang dilaksanakan secara simultan dalam dua sesi sebagai berikut:

- dialog dengan Parlemen Australia dipimpin oleh **Ir. Atte Sugandi, MM,**
- dialog dengan Parlemen Belarus dipimpin oleh **Dra. Harbiah Salahuddin, M.Si.,**
- dialog dengan Parlemen China dipimpin oleh **Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si.,**



- dialog dengan Parlemen India dipimpin oleh **Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH,**
- dialog dengan Parlemen Jepang dipimpin oleh **Ir. Atte Sugandi, MM,**
- dialog dengan Parlemen Kanada dipimpin oleh **Emil Abeng,**
- dialog dengan Parlemen Korea Selatan dipimpin oleh **Dra. Harbiah Salahuddin, M.Si.,**
- dialog dengan Parlemen Rusia dipimpin oleh **Drs. Helmy Fauzy,** dan
- dialog dengan Parlemen Uni Eropa dipimpin oleh **Evita Nursanty, M.Sc.**

Pada kesempatan pertemuan tersebut dibahas topik peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan *capacity building*, mendorong penelitian bersama dan transfer teknologi di bidang agrikultur, pangan dan kehutanan, isu energi dan lingkungan, penguatan upaya untuk adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kerja sama parlemen antara Parlemen AIPA dengan Parlemen Peninjau.

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari muncul juga dalam diskusi beberapa isu bilateral yang memang menjadi perhatian dari masing-masing parlemen, misalnya, antara lain: kemudahan pengurusan visa bagi masyarakat ASEAN yang muncul pada diskusi dengan Parlemen Kanada, peningkatan kuantitas pemberian beasiswa bagi masyarakat ASEAN untuk menempuh pendidikan tinggi di kawasan Parlemen Eropa, dan penguatan kerja sama ekonomi dan investasi dari Rusia, sebagai negara yang kekuatan ekonominya termasuk sepuluh terbesar di dunia, ke negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.

Secara umum, dari dialog tersebut, Parlemen Anggota AIPA dan Parlemen Peninjau telah menyatakan komitmennya untuk memperluas kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan *capacity building* melalui pemberian bantuan teknis dan program pendidikan serta kolaborasi dalam penelitian dan transfer teknologi. Baik AIPA maupun Parlemen Peninjau percaya bahwa pendidikan merupakan elemen instrumental dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan *capacity building*. Parlemen Anggota AIPA mengapresiasi semua dukungan Parlemen Peninjau serta kerjasamanya dalam bidang pendidikan, pelatihan dan program peningkatan kapasitas lainnya untuk masyarakat ASEAN.

Sebagai tambahan, AIPA juga menggarisbawahi kebutuhan untuk memperluas kerja sama kemitraan di sektor energi bersih dan terbarukan. Merupakan tugas bersama Parlemen Anggota AIPA untuk mempromosikan program adaptasi perubahan iklim dan manajemen bencana alam di kawasan. AIPA dan Parlemen Peninjau juga berbagi pandangan yang sama tentang pentingnya membangun kemitraan yang intens dalam perdagangan dan investasi di bidang agrikultur, produk pertanian serta komoditas perdagangan lainnya.

Selain itu, baik Parlemen Anggota AIPA dan Parlemen Peninjau sepakat tentang pentingnya mencari bentuk mekanisme kerja sama Parlemen yang dapat memperdalam hubungan kerja sama yang telah ada selama ini. Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendorong intensitas *people-to-people contact* antara *ASEAN Community* dengan masyarakat Parlemen Peninjau.

Pertemuan rutin antara Parlemen Anggota AIPA dengan Delegasi Parlemen Peninjau menegaskan bahwa sebagai wakil masyarakat ASEAN telah menjadi keinginan yang kuat dari AIPA untuk menggalang kerja sama baik sesama Parlemen Anggota AIPA maupun dengan Parlemen Peninjau yang dapat membawa masyarakat ASEAN dan Parlemen Peninjau ke arah yang lebih sejahtera.

Pengalaman AIPA selama lebih dari empat dekade telah menguatkan ikatan persaudaraan dan solidaritas, tidak hanya antar-Parlemen Anggota AIPA, namun juga dengan Parlemen Peninjau. Hubungan yang intens dengan Parlemen Peninjau merupakan salah satu kunci sukses pembentukan *ASEAN Community 2015* dan hubungan ASEAN dengan komunitas internasional.

Buku terbitan BKSAP ***Concerted Effort of the AIPA in*** ***Supporting the Governments in*** ***Achieving Drug Free ASEAN 2015***

Mengingat sangat minimnya AIPA mengeluarkan buku-buku yang menggambarkan upaya bersama dalam suatu isu, BKSAP membuat buku kajian mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh para parlemen dalam mendukung pemerintah untuk mencapai ASEAN bebas Narkoba tahun



2015. Buku dibuat setelah sidang *AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace* di Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012.

Surat ke Ketua ASEAN Tradisi Baru yang Dimulai DPR RI

Satu hal lagi yang dimulai oleh Indonesia dan semoga dilakukan oleh Presiden AIPA selanjutnya adalah Presiden AIPA mengirim surat kepada *Chairman of ASEAN*, yang saat ini dijabat oleh PM Kamboja, Hun Sen. Surat dikirimkan untuk menyampaikan hasil pertemuan tingkat tinggi yang telah dilaksanakan di level parlemen dan agar poin-poin keputusan yang telah disepakati oleh para parlemen diperhatikan dan mendapat tindak lanjut dari para Kepala Negara ASEAN.

Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA dalam suratnya menyatakan bahwa AIPA telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan dan dipuncaki dengan Sidang Umum AIPA ke-33 yang mengusung tema penguatan peran parlemen dalam upaya bersama pembentukan *ASEAN Community 2015*.

Hasil-hasil signifikan dalam rangkaian pertemuan AIPA dicerminkan dalam pengesahan 11 resolusi yang membahas isu-isu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta isu perempuan. Termasuk di dalamnya adalah peran dan komitmen AIPA untuk berkontribusi dalam penjagaan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Presiden AIPA menegaskan semangat AIPA dalam peran uniknya sebagai perkumpulan para wakil rakyat di ASEAN dan legislator dalam upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita ASEAN dan sebagai jembatan bagi ASEAN dengan rakyat. AIPA juga mempunyai peran besar dalam mendorong upaya pemeliharaan keamanan dan stabilitas di kawasan.

Dalam hal *outreach*, Presiden AIPA menyampaikan peningkatan peran dan postur AIPA di kawasan melalui pembukaan dan pemeliharaan hubungan dengan organisasi parlemen regional lainnya seperti *Pan African Parliament* dan parlemen peninjau. Termasuk kerja sama AIPA dengan organisasi lain di luar parlemen seperti ASEAN WEN, ASEAN SAI, UN Women, dll.

Disampaikan juga ke Ketua ASEAN mengenai komitmen AIPA dalam pencapaian *ASEAN Drug Free 2015*. Salah satunya melalui pembentukan *Technical Working Group on AIFOCOM* serta penyusunan dan penerbitan *AIPA Country Report*.

Terakhir Presiden AIPA mengharapkan peningkatan hubungan yang lebih sinergis dan erat antara AIPA dan ASEAN di masa depan.

Majalah *Highlite* 33rd AIPA General Assembly



Yang lain di sidang AIPA yang dilakukan oleh Indonesia adalah diterbitkannya majalah *Highlite 33rd AIPA General Assembly*, pada setiap hari sidang. Majalah tersebut merekam suasana sidang sehari sebelumnya dan keputusan yang dihasilkan, serta jurnal mengenai agenda kegiatan hari sidang. Tulisan sekitar info-info menarik tentang Lombok, seperti obyek pariwisata dan makanan khas juga menghiasi majalah tersebut.



Hibah AIPA untuk Indonesia Sebanyak USD20.000

Telah diatur dalam *financial regulation* AIPA bahwa setiap parlemen yang menyelenggarakan sidang AIPA mendapat hibah dari anggaran AIPA sebanyak USD20.000. Biasanya oleh parlemen penerima, anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan sidang. Namun mengingat untuk DPR RI biaya penyelenggaraan sidang AIPA sudah dianggarkan di APBN dan untuk menghindari alokasi penganggaraan ganda, DPR RI menggunakan dana tersebut untuk program-program yang tidak dianggarkan di APBN.

Dana tersebut kemudian diantaranya digunakan untuk memberi donasi kepada lima yayasan yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba di Yogyakarta, tempat dilaksanakannya sidang *AIFOCOM to Combat the Drug Menace*, yaitu Rumah Sakit Grashia, Yayasan Al-Islami, Panti Sosial Pamardi Putra, Panti Rehabilitasi Kunci, dan Yayasan Charis. Penggunaan lain adalah untuk hadiah tiga orang pemenang lomba penulisan esai mengenai AIPA; pembuatan buku kajian yang diluncurkan pada saat Sidang Umum AIPA ke-33 mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh parlemen dan negara ASEAN dalam memberantas narkoba; dan bersamaan dengan berakhirnya Sidang



Umum AIPA ke-33 di Lombok, sisa dana yang tersedia disumbangkan kepada masjid Nurul Iman yang berlokasi di Senggigi, di depan hotel Santosa Resort tempat berlangsungnya sidang. Masjid tersebut telah digunakan sebagai tempat ibadah sholat Jum'at bagi seluruh peserta sidang.

Diplomasi DPR RI dalam Mendukung Perdamaian dan Stabilitas Regional: Dukungan terhadap *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)* sebagai *Observer AIPA*

Melalui AIPA, DPR RI telah berhasil mendorong Parlemen Filipina untuk menyetujui permintaan *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)* sebagai *Observer AIPA*. Inisiatif DPR RI dalam mendorong Parlemen Filipina untuk menyetujui permintaan ARMM menjadi *Observer AIPA* bermula dari permintaan perwakilan ARMM kepada DPR RI, segera setelah berakhirnya Sidang AIPA ke-33, untuk memberikan dukungan. DPR RI menyambut baik permintaan tersebut dengan berbagai pertimbangan, antara lain untuk membuka ruang dialog antaraktor-aktor yang berpengaruh di kawasan juga dengan berpedoman pada dasar-dasar statuta AIPA yang memberi ruang bagi AIPA untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain baik di dalam maupun di luar kawasan. Salah satu bentuk kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme *observer* dalam Sidang Umum AIPA. Perlu ditegaskan pula bahwa status ARMM sebagai *Observer AIPA* bukanlah upaya untuk memecah belah kedaulatan Filipina, namun sebaliknya, untuk memperkuat integritas Filipina dengan memberikan legitimasi bagi ARMM sebagai bagian dari Filipina dalam kerangka keluarga besar ASEAN. Masuknya ARMM sebagai *observer* juga bukan berarti bahwa status ARMM meningkat menjadi suatu wilayah yang memiliki kedaulatan (sebuah negara) mengingat *observer* dalam AIPA bisa merupakan organisasi maupun entitas non-negara.

Persetujuan mengenai status ARMM tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua Parlemen Filipina Hon. Feliciano Belmonte, Jr. pada 19 November 2012, yang menyatakan bahwa keterlibatan ARMM di dalam AIPA



dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menjalankan dan mengimplementasikan fungsi kerja keparlemenan. Inisiatif yang diprakarsai oleh DPR RI tersebut telah menunjukkan kontribusi dan komitmen DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlemen guna mendukung pembangunan dan stabilitas sosial-politik di kawasan ASEAN. Langkah tersebut juga telah menjembatani aspirasi masyarakat Muslim Indonesia yang memberikan dukungan terhadap etnis minoritas Muslim di Selatan Filipina. Kebijakan DPR RI di tingkat regional, bukan saja bertujuan untuk mendukung stabilitas dan perdamaian antarnegara, namun juga diharapkan dapat mendorong keberlanjutan stabilitas politik di dalam negeri.

Di tingkat eksekutif, Presiden Benigno Aquino III pada tanggal 7 Oktober 2012 mengumumkan bahwa Pemerintah Filipina telah mencapai kesepakatan damai dengan Barisan Pembebasan Islam Moro (BPIM). Kesepakatan dengan kelompok yang dianggap sebagai pemberontak Islam tersebut diharapkan dapat mengakhiri konflik internal Filipina yang telah berlangsung selama lebih dari tiga puluh tahun.

Kesepakatan damai antara Pemerintah Filipina dan BPIM merupakan awal dari sebuah wacana untuk membentuk wilayah otonomi bagi penduduk minoritas muslim di Mindanao. Selanjutnya, wilayah yang sebelumnya dilanda konflik tersebut akan disebut sebagai Bangsamoro untuk menghormati perjuangan nenek moyang etnis Moro di Filipina.

Pulau Mindanao di bagian Selatan Filipina merupakan wilayah yang ditempati oleh minoritas Islam di negara tersebut dengan jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 5,3 persen yang didominasi oleh komunitas Mindanao dan Mogondinao. Sejak awal tahun 1970-an, dimulailah konflik internal berkepanjangan antara Pemerintah Filipina dan komunitas Muslim yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Selama konflik tersebut, 120 ribu orang telah menjadi korban dan dua juta orang telah kehilangan tempat tinggal dan kondisi hidup yang layak. Konflik internal tersebut juga telah menghambat pembangunan di Selatan Filipina.

Kesepakatan damai yang tercapai pada tahun 2012 merupakan perkembangan yang signifikan dalam negosiasi di antara kedua belah pihak selama 15 tahun terakhir. BPIM sebelumnya berupaya untuk mendirikan negara Islam independen di Mindanao. Upaya tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Di satu sisi, aspek persaudaraan dalam Islam telah menimbulkan

simpati mendalam terhadap perjuangan bangsa Moro, namun di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen dan memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Selama lebih dari 40 tahun, Indonesia yang merupakan salah satu *founding fathers* ASEAN telah berperan aktif dalam membangun kerjasama ekonomi, sosial-budaya, dan menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah berkontribusi aktif dalam pembentukan AIPA dan akan terus memperkuat organisasi ini. DPR RI mengapresiasi pencapaian pihak Pemerintah dan Parlemen Filipina dalam mengupayakan resolusi damai dengan kaum minoritas Moro. Upaya DPR RI merupakan perjuangan tanpa henti dalam mendukung serta menjaga stabilitas di kawasan.



G. Catatan Indonesia terhadap Sekretariat Tetap AIPA

Pada saat kepemimpinan Indonesia di AIPA, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dijabat oleh **Mr. Antonio V. Cuenco** dari Filipina. Dicatat beberapa program yang baru oleh AIPA yaitu dengan membangun kerja sama dengan pemerintah Jerman melalui *Joint Declaration of Intent* untuk “*Capacity Development for the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*” dan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain *ASEAN – AIPA Retreat* di Bali yang cukup berhasil dengan mempertemukan Anggota Parlemen dengan Pejabat ASEAN Sekretariat untuk meningkatkan kesadaran di antara kedua belah pihak mengenai fungsi, mandat, budaya organisasi masing-masing, dan mendiskusikan pre-kondisi untuk membangun dialog yang efektif dan mekanisme konsultasi. Dalam kerangka kerja sama tersebut juga diadakan Pelatihan *Budget Reporting* bagi Staf Parlemen dan *Workshop on Legal Drafting* bagi Anggota Parlemen dan Legal Drafter Parlemen.

Di sisi lain, DPR RI juga memberi catatan khusus terhadap Sekretariat Tetap (Settap) AIPA terhadap pembengkakan anggaran terutama anggaran perjalanan luar negeri dikarenakan Sekjen-nya tidak menetap di Jakarta. Selain anggaran yang meningkat, dampak lain dari kondisi tersebut adalah efektivitas program kerja AIPA tidak dapat maksimal dilaksanakan.

Ini adalah salah satu kelemahan ketika Presiden AIPA harus menerima kandidat yang disodorkan oleh parlemen pengusul dan tidak dapat mengadakan uji kompetensi kelayakan seperti yang dapat dilakukan oleh misalnya *Inter Parliamentary Union* (IPU) ketika memilih Sekjen-nya. Seperti diketahui posisi Sekjen di AIPA adalah jatah yang diberikan bergiliran untuk setiap parlemen anggota, sehingga kualitas Sekjen tersebut sangat tergantung pada parlemen pengusul.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada sidang Komisi Organisasi di Sidang Umum AIPA ke-33, Indonesia menekankan pentingnya parlemen pengusul menyampaikan kandidat yang dapat menjalankan misi AIPA dengan sebaik-baiknya. Sehingga, antara lain sesuai dengan Statuta AIPA Article 13, Sekjen AIPA harus berdomisi di Jakarta, tempat kantor Settap AIPA berada.

DPR RI juga mempunyai ekspektasi bahwa Settap AIPA kedepan harus mampu membuat kajian-kajian baik mengenai isu strategis maupun isu kontemporer yang dihadapi oleh parlemen anggota. Demikian juga, Settap AIPA harus membuat *database* dari isu yang dibahas secara berkelanjutan di AIPA. Contohnya sidang AIFOCOM yang secara tahunan dilaksanakan oleh masing-masing anggota, dari tahun ke tahun sebaiknya ada monitoring mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dan upaya apa lagi yang belum dan perlu dilakukan. Hal penting lainnya adalah resolusi/rekomendasi dan ketetapan AIPA lainnya yang memerlukan tindak lanjut harus dimonitor dengan baik oleh Settap AIPA untuk kemudian mengingatkan parlemen anggota untuk pelaksanaannya.

Mengingat kebutuhan penguatan organisasi, penambahan staf pendukung di Settap AIPA sesuai dengan persyaratan dan standar organisasi internasional harus mulai didiskusikan.



H. Isu-isu Pelik (Kamboja, Laut China Selatan, dan Myanmar)

Kamboja **Belum Siap Menerima Perbedaan** **Pendapat**

Dibalik kedatangan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen selaku Ketua ASEAN ke Sidang Umum AIPA di Lombok, yang tentu saja merupakan catatan penting bagi AIPA karena menunjukkan perhatian besar dari ASEAN kepada AIPA, terjadi suatu insiden yang cukup mengejutkan yaitu gertakan dari Ketua Parlemen Kamboja untuk pulang ke negaranya ditengah-tengah sidang AIPA akibat suatu peristiwa yang di luar kontrol DPR RI.

Seperti diketahui bahwa kondisi Kamboja saat ini adalah persis seperti kondisi Indonesia sebelum reformasi, dimana perbedaan pendapat, terutama dengan pemerintah yang berkuasa, belum dapat diterima. Pada saat berlangsungnya Sidang AIPA, ternyata seorang ketua partai oposisi di Kamboja yang sedang dalam pelarian dan dalam perjalanannya ke beberapa negara untuk mencari dukungan tengah di Indonesia dan juga ke Lombok dalam upaya membangun komunikasi dengan anggota DPR RI.

Pada saat Ketua Parlemen Kamboja mengutarakan kegelisahan dan mengancam akan kembali ke negaranya, Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA langsung berinisiatif untuk mengadakan pertemuan untuk menanyakan langsung duduk perkara dan memberikan respons atas

peristiwa kedatangan anggota partai oposisi Kamboja tersebut, dalam semangat memelihara kesatuan dan saling menghormati. Pada waktu pertemuan seharusnya berlangsung, Ketua Parlemen Kamboja, **H.E. Heng Samrin**, justru mengutus **Mr. Chheang Vun**, Ketua Komisi Urusan Kerja Sama Internasional Parlemen Kamboja untuk bertemu dengan **Dr. Marzuki Alie**. Sebagai wakil dari Kamboja, utusan mempertanyakan alasan DPR RI mengundang anggota oposisi, yang sedang bermasalah hukum di negaranya tersebut, ke Indonesia.

Atas permasalahan tersebut, Ketua DPR RI merespons dengan lugas bahwa secara pribadi maupun institusi Ketua DPR maupun DPR RI tidak pernah mengundang, memfasilitasi maupun mengetahui kehadiran dan aktivitas anggota oposisi tersebut di Lombok. Ketua DPR RI juga menyampaikan, dirinya tidak mengetahui adanya pertemuan antara anggota oposisi tersebut dengan anggota DPR RI, sehingga tidak pada posisi untuk memberi informasi yang terkait dengan hal itu. Lebih lanjut ditegaskan bahwa DPR RI sebagai institusi demokrasi tidak mempunyai kewenangan untuk menghalangi anggota parlemennya untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak manapun atas kapasitas pribadi. Dan sejauh ini tidak ada komitmen yang dibuat yang akan merugikan hubungan kedua parlemen dan negara. Setelah pertemuan tersebut, ternyata Ketua Parlemen Kamboja tetap pulang dengan alasan ada kepentingan di dalam negeri dan posisi ketua delegasi dipimpin oleh anggota senior delegasi Kamboja.

Beberapa saat setelah berakhirnya Sidang Umum AIPA, tidak disangka datang lagi surat dari KBRI di Phnom Penh yang memberitahukan bahwa Dubes RI diundang oleh **Mr. Chheang Vun**, Ketua Komisi Urusan Kerja Sama Internasional Parlemen Kamboja yang meminta penjelasan adanya pertemuan dari anggota partai oposisi Kamboja dalam pelarian dengan pihak Indonesia.

Mengingat bahwa masalah ini telah dibahas dan dijelaskan oleh Ketua DPR RI sendiri, maka DPR RI menginstruksikan kepada KBRI Kamboja untuk menyampaikan kepada Parlemen Kamboja bahwa permasalahan ini sudah diklarifikasi oleh Ketua DPR RI sehingga tidak perlu lagi ada diskusi lebih lanjut. Namun disampaikan juga bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan Kamboja, dan dengan parlemen negara ASEAN lainnya.



Masalah Laut China Selatan Respons Parlemen ASEAN atas Percobaan Diplomasi Ofensif

Pendahuluan

Dalam kedudukannya sebagai Presiden AIPA yang dijabat selama satu tahun antara September 2011 – September 2012, Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie** secara otomatis harus berhadapan dengan berbagai masalah kawasan yang pelik. Dibandingkan dengan masalah kawasan lainnya, seperti masalah demokratisasi Myanmar dan Kamboja, penegakan *transitional justice* pasca-otoriterisme di kedua negara, serta masalah kekerasan di Rohingnya yang mengusik bangsa Indonesia, maka persoalan Laut China Selatan adalah isu pelik yang dihadapi sebagai pemimpin tertinggi Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA).

Mengapa demikian? Terdapat beberapa alasan untuk mengatakan demikian, yakni: (1) solusi demokratisasi dan *transitional justice* pasca-otoriterisme di Myanmar dan Kamboja memperoleh banyak bantuan dan *pressure* negara-negara Barat, sehingga kemajuan dalam penyelesaian masalahnya dapat berjalan signifikan dan dapat dilihat hasilnya di lapangan. Sedangkan (2) masalah pengungsi Rohingnya mendapat bantuan tekanan penyelesaian dari Barat, negara-negara Islam, dan anggota OKI lainnya, serta sudah mulai direspons Pemerintah Myanmar dengan sinyal positif.

Namun, berbeda dengan kedua masalah kawasan tersebut, dalam masalah Laut China Selatan tekanan untuk penyelesaian masalah hanya datang dari AS sepihak. Kemudian, (3) anggota ASEAN, yang juga merupakan anggota AIPA, tidak memiliki satu sikap, tidak kompak, dan tidak memiliki pandangan yang sama atas solusi yang harus diambil. Tidak heran (4), masalah Laut China Selatan yang sudah berlangsung sejak dua dasawarsa belakangan terus berlarut, dan kebetulan mengalami eskalasi ketegangan yang memuncak dalam era kepemimpinan AIPA di bawah Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie**. Dua kekuatan militer yang berkonstelasi di laut, yakni Angkatan Laut (AL) Filipina dan AL Republik Rakyat China (RRC) saling berhadapan dan siap melakukan perang terbuka.

Secara nyata, masalah Laut China Selatan telah berkembang dari sekadar konflik klaim teritorial atau perang kata-kata atas posisi klaim masing-masing pihak yang bersengketa (*claymants*) menjadi konflik terbuka. Atau dari perang urat-saraf yang disampaikan melalui corong media massa menjadi perang terbuka di perairan.

Solusi dengan diplomasi elit telah bergeser menjadi *gun boat diplomacy* dengan pengiriman kapal-kapal perang, baik oleh RRC, Vietnam, dan Filipina, yang didukung negara adidaya AS, sekutu dekatnya. Masing-masing melakukan *pressure* dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing.

Demikian pula *silent diplomacy* yang berusaha dilakukan RRC dan kemudian cenderung diikuti Indonesia selaku *big brother*. Melalui pendekatan bilateral, seteru seperti Filipina dan Vietnam mengembangkan secara taktis diplomasi tersebut menjadi *megaphone diplomacy*. Model diplomasi yang menginginkan pendekatan multilateral dalam penyelesaian masalah, yang bahkan diperluas dengan melibatkan negara adidaya AS untuk menambah dukungan di meja diplomasi maupun di kawasan perairan yang disengketakan.

Negara pengklaim yang berkonflik langsung memang tetap, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam, tetapi, Indonesia, walaupun bukan negara pengklaim tidak bisa diabaikan berkepentingan secara tidak langsung atas bagaimana negara-negara pengklaim menemukan dan memberlakukan mekanisme solusinya. Jika tidak, apabila solusi yang memberlakukan UNCLOS tidak diterapkan, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan akan dirugikan dengan hilangnya hak pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif. Kebebasan lintas batas akan hilang di bagian-bagian perairan yang seharusnya dijamin karena merupakan jalur perairan internasional.

Begitu pula dengan negara-negara anggota ASEAN/AIPA lain di sekitarnya, dan bahkan negara di luar kawasan, seperti AS, yang sangat berkepentingan atas kebebasan berlayar di Laut China Selatan. Mereka mempunyai kepentingan untuk memelihara jalur pelayaran, transportasi logistik, dan keamanan energinya.

Pengetahuan atas informasi dasar mengenai mandala konflik yang menjadi klaim tumpang tindih di Laut China Selatan secara signifikan menjadi penting. Begitu pula dengan pengetahuan terhadap terminologi dan konsep seperti negara kepulauan, organisasi kawasan, komunitas kawasan, khususnya komunitas politik dan keamanan,



solusi bilateral, solusi multilateral, *second track diplomacy*, *back-door diplomacy*, *megaphone diplomacy*, dan *gun boat diplomacy*.

Pemahaman masalah menumbuhkan keprihatinan dan perhatian yang mendalam untuk memperjuangkan kepentingan nasional di medan diplomasi. Dari pemahaman masalah ini akan terasah kemampuan para Anggota Parlemen (DPR RI) untuk melakukan aktivitas diplomasi secara efektif, dengan target yang maksimal, namun berbiaya efisien.

Sebaliknya, dengan bekal informasi yang minim dan pemahaman konflik kawasan dan resolusi konflik yang terbatas, semangat diplomasi perjuangan seperti di awal periode kemerdekaan tidak dapat muncul. Diplomasi akan menjadi seperti tugas rutin, tanpa sasaran yang jelas dan terukur.

Dengan latar belakang ini, dapat dipahami mengapa Indonesia khawatir jika polarisasi kepentingan dan pandangan diantara Anggota AIPA akan berakibat negatif. Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok diharapkan mengakhiri sidang-sidang komisinya secara sukses dan mencapai kesepakatan bulat yang ditandai dengan keberhasilan membuat *Joint Communiqué*.

Kekhawatiran ini beralasan, karena pertemuan Menlu-menlu ASEAN sebelumnya di Phnom Penh, Kamboja, yang juga mencari solusi atas konflik Laut China Selatan, gagal menghasilkan kesepakatan bersama semacam itu –sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah ASEAN selama empat dasawarsa lebih! Pentingnya sikap bulat atau konsensus penuh di ASEAN/AIPA dalam pendekatan teoritik konstruktivis dapat dipahami, jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar yang belum luntur di kawasan.

Tetapi, selebar apapun perbedaan pandangan yang ada diantara negara anggota ASEAN/AIPA, biasanya selalu dapat diakhiri dengan *happy ending*. Solusi yang memenangkan semua pihak dapat ditemukan tanpa ada satu negara anggota pun yang berada di atas angin berhasil memaksakan kehendaknya.

Demikian pula, nilai-nilai lama anti-intervensi atas masalah nasional, sakralnya kedaulatan nasional, dan sensitifnya masalah Hak-hak Asasi Manusia (HAM), masih dipegang kuat. Bayangan akan terjadi perpecahan karena adanya pesanan, apalagi tekanan, kepentingan asing tidak lagi menjadi alasan.

Namun dalam kenyataannya, tanpa disadari apalagi diantisipasi, prinsip-prinsip dasar ASEAN mulai goyah sejalan dengan munculnya perubahan lingkungan strategis di kawasan. Satu negara kecil sebagai *new comer* di ASEAN/AIPA, seperti Kamboja, ketika menjadi tuan rumah bisa memperlihatkan sikap yang keras dan kaku dalam pertemuan antar-Menlu ASEAN yang hendak mencari solusi atas konflik di Laut China Selatan. Kamboja memperlihatkan sikap ketidakeleganannya terhadap para tamunya sesama anggota ASEAN, yaitu tetangga dekatnya Vietnam, dan bahkan Filipina dan Indonesia, yang keduanya merupakan pendiri ASEAN. Indonesia sendiri dianggap sebagai *big brother* yang selama beberapa dasawarsa disegani kepemimpinannya.

Sikap Vietnam dan Filipina, serta Malaysia dan Brunei Darussalam yang menghendaki dihasilkannya sebuah *Code of Conduct* di Laut China Selatan, seperti juga dikehendaki Indonesia, adalah logis. Tetapi Kamboja, yang diikuti Myanmar dan Laos, tidak mau insiden yang mengarah pada penindakan dan aksi kekerasan (militer) disebut dalam *Joint Communiqué*. Penolakan terhadap hasil yang dapat menjadi bagian dari referensi untuk menghasilkan *Code of Conduct* guna menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, tentu saja dirasakan aneh. Terutama mengingat negara-negara anggota baru tersebut bukanlah negara pengklaim, yang tidak punya klaim kedaulatan teritorial.

Awal Kesulitan

Sebelum Sidang Umum AIPA ke-33 berlangsung pada 16 s.d. 22 September 2012 di Lombok, Indonesia, telah dilangsungkan Sidang *Excom* pada Juli 2012 di Yogyakarta. Sidang *Excom* seharusnya dilaksanakan tiga bulan lebih dulu untuk menyiapkan agenda Sidang Umum. Berdasarkan Statuta baru AIPA, Sidang *Excom* dimungkinkan dilaksanakan pada bulan Juli bersamaan dengan pelaksanaan *The 9th Meeting of the AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace*. Dalam kesempatan itu, Presiden AIPA memimpin Sidang *Excom* dan bersama-sama utusan anggota parlemen AIPA lainnya menyetujui masalah Laut China Selatan sebagai salah satu agenda yang akan dibahas dan dibantu dicarikan solusinya melalui Sidang Umum, forum tertinggi perkumpulan parlemen regional ASEAN tersebut di Lombok nanti.

Di Yogyakarta, tidak ada satu pihak pun yang keberatan, termasuk Kamboja, Myanmar ataupun Laos, terhadap penetapan agenda yang memang krusial dan mendesak



untuk dibantu dicarikan solusi. Saat itu di lapangan terjadi eskalasi ketegangan yang rawan pecah menjadi konflik terbuka antara kekuatan Angkatan Laut RRC melawan Filipina, dan RRC melawan Vietnam. Pada saat itu, kesepakatan (konsensus) bulat, sebagaimana halnya selama lebih empat dasawarsa telah menjadi tradisi ASEAN/AIPA, berhasil dicapai.

Menariknya, dalam perjalanan waktu dua bulan berikutnya terjadi perkembangan yang kontraproduktif. Muncul perubahan sikap Kamboja dan Myanmar yang hendak membatalkan dukungannya yang berarti menginginkan dihentikannya segera pembicaraan tentang masalah Laut China Selatan. Mereka menginginkan masalah tersebut tidak dibawa ke Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok.

Perubahan sikap kedua negara itu secara drastis diperlihatkan ketika Presiden AIPA, **Dr. Marzuki Alie**, melakukan kunjungan muhibah penyampaian undangan untuk Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok ke kedua negara serta guna menemui pimpinan masing-masing parlemen dan juga Ketua ASEAN, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. Hun Sen secara langsung dilaporkan menyampaikan pesan ini dengan kompensasi kepastian kedatangannya ke Sidang Umum AIPA ke-33. Sehingga, pesan Ketua ASEAN itu menjadi beban yang berat bagi Presiden AIPA untuk dapat merealisasikan seluruh agenda Sidang Umum seperti yang sudah digariskan dalam Sidang *Excom* sebelumnya.

Di sisi lain, sesuai dengan konvensi yang ada, pihak tuan rumah telah membantu penyiapan draf resolusi tentang masalah Laut China Selatan yang memang telah ada di agenda yang disepakati. Mustahil mengubah agenda Sidang Umum tanpa melalui digelarnya Sidang *Excom* yang baru. Oleh karena itu, penyiapan draf resolusi Laut China Selatan tetap dibuat, namun dibuat secara lebih hati-hati agar tidak ada resistensi dari satu negara anggota AIPA pun. Diharapkan Sidang Umum AIPA ke-33 dapat berlangsung dengan nyaman dan sukses.

Pihak Kedubes RRC yang selama ini berada di balik resistensi pemerintah dan perubahan sikap parlemen Kamboja dan Myanmar tampak aktif me-*lobby* pihak tuan rumah penyelenggara agar materi Laut China Selatan ditanggalkan. Intervensi dari negara non-anggota, sekalipun mereka merupakan negara besar di kawasan, tidaklah lazim karena tidak pernah terjadi sepanjang sejarah perjalanan AIPA. Hal ini secara realistis mendorong pihak yang dirugikan dengan agenda tersebut, yaitu RRC, kian agresif

melancarkan diplomasi bilateral ke pimpinan DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melalui apa yang dikenal selama ini sebagai praktik-praktik *back-door diplomacy*.

Targetnya jelas, setelah gagal *me-lobby* para pembantu di lapangan, kini diplomasi ofensif harus dilakukan ke pembuat kebijakan. Diplomasi *all-out* dilakukan oleh orang kedua tertinggi di Kedubes RRC ke parlemen. Hal seperti ini jarang terjadi di negara lain, dan dapat terjadi di Indonesia karena sikap orang Indonesia yang pada umumnya rendah hati dan ramah. Pihak Kedubes RRC terus menekankan sudah baik dan amat pentingnya hubungan bilateral RRC-RI selama ini. Sisi-sisi personal pun berusaha digugah dalam diplomasi ofensif Kedubes RRC ke Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI dalam upaya melunakkan sikap parlemen Indonesia.

Sikap fleksibel dan toleran yang tinggi dari Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI dimaksudkan untuk mencegah terganggu dan gagalnya Sidang Umum AIPA ke-33 untuk menghasilkan konsensus. Sikap tersebut dapat dipahami, namun penanggalan draf resolusi masalah Laut China Selatan tetap tidak dapat dilakukan karena sudah disepakati dalam Sidang *Excom*.

Sikap yang sama juga dimaksudkan untuk menjaga eksistensi AIPA sebagai organisasi parlemen kawasan, yang dalam kurang dari tiga tahun lagi sudah harus tumbuh menjadi pilar politik *ASEAN Community*. *Worst-case scenario* disiapkan jika Kamboja dan Myanmar memaksakan kehendaknya. Karena itulah kemudian, perbaikan draf resolusi masalah Laut China Selatan terus dilakukan berdasarkan masukan revisi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali RRC, yang bukan anggota.

Dalam perkembangan selanjutnya, meramu draf resolusi menjadi bertambah berat setelah Grup Nasional Delegasi Parlemen Filipina dan Vietnam mengirimkan draf resolusi versinya masing-masing, yang tentu saja nadanya lebih keras dan akan mengundang resistensi lebih kuat, karena telah disesuaikan dengan tuntutan kepentingan nasional masing-masing. Draft Filipina tampak jauh lebih keras, karena sejak awal judul resolusinya sudah menyebut langsung Laut Filipina Barat (*West Philippines Sea*) untuk mengganti Laut China Selatan yang dikonflikkan dengan RRC. Sedangkan Vietnam baru menyebut Laut China Selatan dengan versinya, sebagai Laut Timur atau *East Sea*, di bagian isi resolusi, terutama paragraf operatif.



Walaupun demikian, kedua negara tetap memberikan ruang bagi Indonesia, tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33, untuk mengonsolidasikannya dalam sebuah draf resolusi baru. Di luar ini, Sekjen AIPA asal Filipina, yang mantan anggota Kongres Filipina, Antonio Quenco, mengajukan draf resolusi versinya sendiri, yang secara komprehensif sangat subyektif membela kepentingan negerinya.

Tantangan Diplomasi Parlemen

Parlemen DPR RI dalam Sidang Umum AIPA ke-33 memiliki misi sebagai pelaksana diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*) sebagaimana yang dijalankan dalam misi-misi di forum internasional lainnya, seperti *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*, *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, dan lain-lain. Melalui jalur ini, DPR RI memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi memperjuangkan kepentingan konstituen dan rakyat Indonesia secara lebih luas di kawasan.

Tetapi, keterbatasan kinerja muncul karena keterbatasan dalam memahami masalah yang muncul dan berkembang cepat, dan menjadi kompleks kemudian. Demikian pula, waktu persiapan yang semakin terbatas, mengingat banyak rapat-rapat kerja parlemen dan kepentingan konstituen lainnya, yang lebih mendesak harus diselesaikan. Sebagai konsekuensinya, anggota Grup Nasional Delegasi Parlemen Indonesia harus cepat merespons perkembangan situasi terkait isu Laut China Selatan dan tekanan diplomasi ofensif dan agresif RRC melalui Kedubes RRC yang notabene dari pihak pemerintah, bukan parlemen.

Tuan rumah khawatir jika tekanan diplomasi RRC dan permintaan Ketua ASEAN Hun Sen serta Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja dan Myanmar diabaikan atau tidak diperhatikan sama sekali akan berimplikasi langsung pada gagalnya pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok. Di sisi lain, Grup Nasional Delegasi Parlemen tuan rumah penyelenggara AIPA menyadari sepenuhnya bahwa jika aspirasi dan kepentingan negara pengklaim kedaulatan teritorial Laut China Selatan yang anggota ASEAN/AIPA, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam, diabaikan maka Sidang Umum di Lombok tersebut juga tidak dapat berlangsung. Sebab, sesuai dengan Ketentuan Dasar (Statuta) AIPA, Sidang Umum baru dapat dilaksanakan jika semua anggota dapat memutuskan secara konsensus untuk bertemu, termasuk menggelar Sidang Umum, dan menghasilkan keputusan.

Hasil diskusi antara Presiden AIPA dengan Delegasi DPR RI akhirnya memutuskan untuk menggelar Sidang *Excom* untuk menyampaikan usulan dan kondisi yang berkembang, serta keputusan baru yang harus diambil, agar Sidang Umum AIPA ke-33 dapat terus dijalankan. Selanjutnya, *Organizing Committee* segera mempersiapkan rencana menggelar Sidang *Excom* pada hari Selasa, 18 September 2012, sebelum *the First Plenary Session of the 33rd General Assembly*. Di sela-sela waktu yang berlangsung, anggota delegasi parlemen Indonesia terus mengikuti perkembangan yang terjadi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berkembang sampai Sidang *Excom* digelar keesokan harinya.

Praktik *second track diplomacy* dan kinerja Grup Nasional Delegasi Parlemen Indonesia benar-benar diuji dalam Sidang *Excom* pada 17 September 2012. Kecakapan dan kapasitas individual pemimpin dan anggota Grup Nasional Delegasi Parlemen dan AIPA juga diuji di sini. Vietnam dan Filipina, yang didukung Malaysia dan Brunei Darussalam yang sebelumnya tanpa suara (*silent*) kini menyalak dengan melontarkan agumen-argumen yang rasional dan kuat. Sementara itu, pimpinan Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja memperlihatkan manuvernya dengan *megaphone diplomacy*, yang sebelumnya ditentangnya, untuk mempertahankan kepentingan pesanan patron-nya, RRC.

Namun usaha Kamboja untuk tidak mengagendakan sama sekali masalah Laut China Selatan di Komisi Politik kandas. Grup Nasional Delegasi Parlemen atau anggota AIPA lainnya setuju untuk dilanjutkan, asalkan dibuat tidak menyerang atau provokatif terhadap (kepentingan) satu negara manapun, apalagi RRC, sebagai negara besar pengklaim di luar AIPA. Sidang *Excom* AIPA ditutup dengan kesepakatan resolusi ini lebih mengenai situasi dan stabilitas keamanan di kawasan pada umumnya.

Setelah usai Sidang *Excom*, Grup Nasional Delegasi Parlemen Indonesia, terutama pimpinan dan anggota Komisi Politik, melakukan rapat internal untuk menghadapi (pembukaan) Sidang Umum keesokan harinya. Agenda utama adalah membahas persiapan Komisi Politik dan menegaskan kembali penugasan masing-masing pimpinan dan anggota delegasi.

Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja sendiri terus berhubungan dengan patron RRC mereka, yang pasti hadir, walaupun secara tidak diketahui dan tidak formal, untuk mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu terkait masalah Laut China Selatan.



Tim Komisi Politik DPR RI harus segera mempersiapkan draf alternatif yang baru saja diputuskan Sidang *Excom*. Hal ini tidak mudah dikerjakan mengingat masih terdapat dua persepsi yang berbeda, yaitu menyebutkan Laut China Selatan dan mengenai stabilitas keamanan di kawasan. Namun untuk mempersiapkan segala skenario, tetap disusun draf alternatif yang tidak mengabaikan sama sekali penyebutan nama Laut China Selatan dan tetap ditawarkan solusi lewat Enam Butir Deklarasi Aturan Berperilaku di Laut China Selatan (*Six Points Principles on South China Sea*).

Pelaksanaan Sidang *Excom* menunjukkan skenario kasus terburuk. Grup Nasional Delegasi Parlemen Vietnam dan Filipina menagih draf resolusi yang lebih umum untuk tidak mengabaikan sama sekali penyebutan masalah Laut China Selatan. Sedangkan Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja memperlihatkan resistensinya yang tinggi dan menolak sama sekali adanya draf resolusi yang membicarakan masalah Laut China Selatan.

Sikap Ketua Delegasi Kamboja yang begitu egois dan emosional diperkirakan karena beban yang disandangnya. Mereka berpendapat Sidang *Excom* sudah menyepakati bahwa draf resolusi baru hanya menyebut dan memuat masalah stabilitas keamanan pada umumnya di kawasan, tanpa ada menyebut rujukan sama sekali pada nomenklatur Laut China Selatan. Sidang ini hampir saja menemui *deadlock* yang dapat berkontribusi pada kegagalan Sidang Umum AIPA ke-33, jika tidak ada draf alternatif kedua yang disiapkan Komite Politik. Berkat adanya kesiapan Tim dalam menyusun draf alternatif kedua yang memasukkan salah satu klausul *Six Points Principles on South China Sea*, Ketua Sidang Komite Politik, **Hayono Isman**, dapat segera mengatasi debat yang tidak berkesudahan dan menyodorkan jalan keluar. *Deadlock* dapat dicegah.

Pada awalnya tidak ada perubahan sikap Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja, karena beratnya beban kepentingan yang harus ditanggungnya. Sehingga Sidang diskor lebih dulu untuk mengurangi eskalasi ketegangan yang sudah mencapai puncaknya dan untuk memberikan kesempatan dilakukannya *lobby* dengan Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja. Sayangnya, pada tahap ini, Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja memperlihatkan sikap yang tegang dan bertahan pada posisi yang tidak benar, bahwa hasil Sidang *Excom* yang digelar kemarin pagi telah memutuskan draf resolusi baru bertema masalah keamanan dan stabilitas keamanan di kawasan secara umum, tanpa ada sama sekali menyebut

Laut China Selatan seperti yang masih menempel di usulan perumusan solusi yang ditawarkan Ketua Sidang Komite Politik. Dengan muka merah padam dan tangan bergetar, Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja, menahan kemarahan besar, tetap menolak, dan bahkan masih mencoba, agar semua delegasi menerima pendapatnya, yang sangat minoritas itu, mengingat Myanmar dan Laos, tidak bersuara keras lagi. Sama halnya, Grup Nasional Delegasi Parlemen Malaysia dan juga Brunei Darussalam menunjukkan sikap yang semakin keras, agar Kamboja mau menerima langkah skors untuk kompromi yang telah ditawarkan Ketua Sidang agar sidang tidak buntu total.

Setelah itu terjadi perkembangan yang menarik. Sidang Komisi Politik dibuka kembali, dengan posisi sikap Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja masih kukuh, dengan temperamen yang masih tinggi dan sangat emosional. Ia bersikeras tidak mau setelah penggunaan terminologi *Six Point Principles* ada kata-kata *South China Sea*. Baginya ini seperti memanaskan keadaan yang kondisinya di lapangan sudah tenang. Walaupun tidak sepenuhnya ada kebenaran dalam pendapat tersebut karena belum ada *Code of Conduct* yang mengatur navigasi dan mencegah konflik jika muncul masalah akibat tabrakan kapal, kecelakaan, dan sebagainya. Dan juga, ia menegaskan kembali, Sidang *Excom* pagi sebelumnya sebenarnya hanya memandatkan pembuatan sebuah draf resolusi Komisi Politik mengenai situasi kawasan yang umum, tanpa menyebut sedikitpun tentang Laut China Selatan.

Bagi Grup Nasional Delegasi Parlemen Indonesia dan Pimpinan Sidang, kata Laut China Selatan tidak mungkin ditanggalkan sebab ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum yang harus disebut secara lengkap. Sebab, jika ditanggalkan, dan menjadi tidak lengkap, produk hukum yang ada di bagian paragraf operatif itu tidak dapat dijadikan referensi hukum untuk diimplementasikan. Mengenai hal ini, dan dalam tahap ini, Ketua Sidang Komisi Politik bergeming, dan tetap pada pendapatnya.

Menurut sebuah sumber dari ASEAN, yang mengamati apa yang tengah berlangsung, terjadi perubahan sikap Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja setelah ia tampaknya menerima dan membaca SMS yang diduga merupakan perintah persetujuan dan dukungan untuk perubahan sikap dari luar ruang sidang, yang diduga berasal dari PM Hun Sen. Karena itulah, begitu mengejutkan, dan disambut gempita delegasi yang hadir,



ketika Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja tiba-tiba menyatakan dapat menerima penyebutan referensi produk hukum yang menyebut nama Laut China Selatan tersebut secara utuh.

Lepas dari adanya kabar persetujuan itu, tampaknya ia tidak lagi mempunyai argumentasi untuk mempertahankan sikap keras sebelumnya. Perubahan sikap secara tiba-tiba ini membuat perubahan air muka Ketua Grup Nasional Delegasi Parlemen Kamboja, karena sikap menahan malu akibat upaya kerasnya tidak tercapai. Suara bulat atau syarat untuk menghasilkan draf resolusi Komisi Politik yang menjadi panduan dapat dicapai. Draft resolusi sudah tepat untuk solusi konflik Laut China Selatan, walaupun konflik di laut itu tidak disebutkan secara eksplisit namun tetap mengena untuk solusi konflik di wilayah lainnya di kawasan tempat negara anggota ASEAN/AIPA berlokasi.

Apa yang Dapat Disimpulkan?

Apa yang dapat direfleksikan dan disimpulkan dari pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-33 yang telah berlangsung pada 16 – 22 September 2012 tersebut?

Pertama, second-track diplomacy parlemen Indonesia perlu didorong lebih kuat untuk bersifat aktif dan tidak menunggu, karena ini akan membuka peluang negara lain yang berkepentingan untuk melakukan *pressure* dan mendikte. Sebaliknya, *kedua*, berbagai upaya *back-door diplomacy* di masa depan harus menguntungkan. Melalui cara diplomasi ini, Grup Nasional Delegasi Parlemen Indonesia tidak boleh enggan untuk memperlihatkan sikap yang tegas melalui diplomasi parlemen yang ofensif, apalagi agresif, setingkat level-nya dengan pihak (negara) lain yang berkepentingan.

Kemudian, *ketiga*, realita yang ada memperlihatkan bahwa diplomasi parlemen kita tidak boleh bersifat menunggu dan menerima apapun yang akan terjadi, namun harus antisipatif dengan skenario cadangan yang beragam, lengkap dengan strateginya masing-masing. Kecenderungannya, baik negara dalam maupun luar kawasan, negara besar maupun kecil, atau kawan lama maupun baru yang berkepentingan, ingin selalu memengaruhi parlemen Indonesia sebagai pemain utama dan penggagas pembentukan organisasi

kawasan tersebut, baik melalui jalur parlemen maupun pemerintah mereka. Indonesia tampak terus diuji otoritas dan kewibawaannya, sehingga harus dicermati di masa depan dalam menjalankan diplomasi parlemen, untuk lebih aktif, reaktif dan menggunakan *all levels* sebagai negara besar dengan kemampuan daya tawar yang besar.

Keempat, terakhir, realitas memperlihatkan semakin banyak negara anggota ASEAN/AIPA, semakin sulit bagi organisasi kawasan ini untuk mencapai kata sepakat dan meraih konsensus, karena negara pendatang baru yang kecil dapat menekan negara besar pendirinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ongkos perluasan ASEAN/AIPA sangat mahal, yang dapat memengaruhi apakah organisasi kawasan ini dapat meraih cita-citanya mewujudkan sebuah komunitas kawasan dalam kurang dari tiga tahun ke depan.

Kukuh-nya sikap Kamboja, dan malu-malunya sikap Laos dan Myanmar yang pro-RRC, berhadapan dengan Malaysia dan Brunei yang *silent* di media massa, namun keras di sidang multilateral AIPA dalam membahas masalah Laut China Selatan, menimbulkan pertanyaan akan menuju atau dibawa kemana ASEAN?

Tidak efektifnya Sekretariat Tetap AIPA dalam menjalankan tugasnya, dan sulitnya institusi permanen ini menghindari sikap partisan, turut berkontribusi pada kesulitan AIPA dalam meraih hasil optimal melalui berbagai kegiatan dan sidang-sidangnya, terutama mencari solusi untuk dapat diselesaikan Komite Politik dalam soal Laut China Selatan.

Untungnya, perjalanan Sidang Umum AIPA di Lombok tidak mengikuti Sidang Menlu-menlu ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, yang tidak dapat menghasilkan *Joint Communiqué*, akibat tekanan negara tertentu. AIPA tidak boleh tidak berdaya untuk menghasilkan keputusan yang tegas dan prospektif, karena ia merupakan pilar politik yang diandalkan untuk mewujudkan *ASEAN Community 2015* melalui kekuatan diplomasi parlemennya. Sebagai konsekuensinya, resolusi Komite Politik mengenai keamanan dan stabilitas kawasan sebagai resolusi alternatif untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan harus segera diimplementasikan dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, untuk menunjukkan bahwa Pilar Politik AIPA masih kuat menuju keberhasilan pembentukan *ASEAN Community 2015!*



Kasus Rohingya

Batu Uji Efektivitas dan

Kohesivitas Menuju Integrasi

ASEAN 2015

Latar Belakang Kerusuhan Komunal di Myanmar

Peristiwa kerusuhan massal Rohingya Myanmar menjadi salah satu masalah yang cukup serius bagi kohesivitas dan kerja sama ASEAN menuju pembentukan *ASEAN Community 2015*, mengingat tingkat sensitivitas persoalan ini yang cukup tinggi. Sebagian pihak pada awalnya menilai bahwa kasus ini berkait dengan isu agama dari komunitas yang berkonflik di Myanmar. Terlebih dapat dipahami bahwa sensitivitas isu sentimen agama merupakan salah satu unsur yang sangat tajam yang dapat memecah-belah kohesivitas dan efektivitas ASEAN, karena berkaitan dengan salah satu agama besar di kawasan Asia Tenggara, yakni Islam (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam) dan Budha (Thailand, Myanmar, dan Kamboja).

Dalam perkembangannya, pihak otoritas Myanmar telah menyampaikan klarifikasi mengenai kerusuhan komunal yang bermula pada tanggal 28 Mei 2012 yang lalu. Kerusuhan tersebut bukanlah berakar dari tindakan pembiaran atau tindakan diskriminasi rasial dari negara, melainkan karena tindak kriminal di antara warga masyarakat. Kerusuhan komunal tersebut terjadi karena kesalahpahaman di antara etnis Rakhine dan Bengalis (Rohingya) yang menetap di wilayah Rakhine. Etnis Rakhine beragama Budha, sedangkan etnis Bengalis beragama Islam.

Pemicu kerusuhan adalah tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita muda di desa Kyak Ni Maw, kota Yanbye, pada 28 Mei 2012, yang dilakukan oleh tiga orang pemuda yang diduga beragama Islam. Mendengar peristiwa ini, para pemuda Rakhine murka dan menyerang balik dengan menghancurkan sebuah bus penumpang, dan menganiaya para penumpangnya, sehingga mengakibatkan 10 orang penumpangnya yang beragama Islam tewas. Setelah kejadian ini, tindakan saling serang dan membalas terus terjadi antara komunitas Rakhine dan Bengalis. Kerusuhan pecah di kota Sittway, Maungtaw, dan Buthidaung. Perusuh membakar dan menghancurkan rumah, toko, penginapan, serta terlibat

pembunuhan. Kerusuhan menewaskan 87 orang (31 orang dari ras Rakhine dan 56 orang dari ras Bengalis) dan melukai 120 orang lainnya (50 orang dari ras Rakhine dan 70 orang dari ras Bengalis), serta membumihanguskan 5.338 rumah.¹

Pihak berwenang segera bertindak, menegakkan ketertiban dan peraturan, untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Tindakan Otoritas Myanmar mengumumkan Pasal 144 UU Pidana Myanmar untuk meredam kerusuhan telah dijalankan, namun tidak berhasil karena jumlah dan kekuatan pihak kepolisian kalah jauh dibandingkan massa perusuh. Kemudian, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar (*the National Defence and Security Council*), Presiden Myanmar mengumumkan keadaan darurat dan menempatkan kekuatan keamanannya, termasuk pihak militer, untuk mengendalikan situasi agar dapat kembali normal. Pemerintah pusat Myanmar dan pemerintah daerah Rakhine akhirnya berhasil memulihkan situasi, melakukan rekonstruksi, dan rehabilitasi.

Persepsi Media Massa Indonesia atas Isu Kerusuhan Komunal di Myanmar

Pada awal-awal pecahnya kerusuhan komunal, masyarakat dan media massa Indonesia beranggapan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena tindak kekerasan negara secara sistematis terhadap kaum minoritas di kawasan tersebut. Anggapan ini berkembang membesar seiring dengan banyaknya laporan media mengenai kerusuhan komunal di Myanmar, dan diimbuh dengan belum adanya *counter explanation* dari pihak Pemerintah Myanmar atas isu kerusuhan komunal tersebut. Pembiaran (kevakuman klarifikasi dari pihak Pemerintah Myanmar) ini mendorong semakin banyaknya demonstrasi aspirasi jalanan dari kelompok LSM, organisasi massa, dan liputan media massa di Indonesia. Kondisi yang terjadi pada masyarakat Indonesia dalam konteks ini adalah penerimaan informasi yang banyak kesalahan, dimana informasi tersebut berasal dari liputan media massa.

Beberapa saat setelah dimuatnya peristiwa kerusuhan komunal tersebut di media massa Indonesia, pihak

¹ Pernyataan resmi oleh H.E. U Nyunt Tin, Ketua Delegasi Parlemen Myanmar pada Sidang Umum AIPA ke-33, Lombok, 16 s.d. 22 September 2012



pemerintah Myanmar melalui jalur-jalur diplomatiknya tidak segera memberikan klarifikasi resmi dan kurang memadai dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada kerusuhan komunal di Myanmar. Media massa Indonesia sudah terlebih dahulu menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah tidak hanya peristiwa kerusuhan komunal biasa, namun beraroma sentimen agama dan terjadi pembiaran dari negara. Terlebih juga, terjadinya arus pengungsian dari ratusan etnis Rohingya ke berbagai wilayah di luar negara Myanmar. Indonesia sendiri menampung sekitar 500 pengungsi Rohingya Myanmar, belum lagi yang berada di perbatasan Bangladesh dan Thailand.²

Tidak adanya klarifikasi segera dari pihak otoritatif Myanmar (pihak diplomatik Myanmar di Indonesia atau kementerian luar negeri Myanmar) atas apa yang sesungguhnya terjadi dan tidak adanya tindakan cepat untuk memulihkan kondisi dan pemberitaan telah mendorong terjadinya banyak demonstrasi jalanan di Indonesia, mengutuk atas terjadinya tindak kerusuhan komunal yang beraroma sentimen agama yang menewaskan banyak kaum muslimin di Myanmar.

Keprihatinan ini juga yang dikemukakan oleh Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33, **Dr. Marzuki Alie**, dalam surat tanggapannya terhadap surat dari **H.E. Mr. Khin Aung Myint** (Ketua Parlemen Myanmar), sebagai wujud penyampaian aspirasi bangsa Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, atas peristiwa kerusuhan komunal di Rakhine. Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33 menyampaikan penghargaan atas penjelasan dan klarifikasi dari Ketua Parlemen Republik Persatuan Myanmar guna meluruskan informasi yang tidak akurat yang berkembang di dalam negeri Indonesia, baik di tingkat media massa lokal dan nasional, maupun di tingkat masyarakat publik (LSM, organisasi massa, dan lainnya). Hal ini juga didorong oleh kenyataan faktual bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dan telah banyak berperan aktif dalam berbagai aktivitas dan organisasi internasional. Faktanya, dalam beberapa pekan masa kerusuhan komunal di Myanmar meletus, terjadi pula kemarahan publik Indonesia yang meluas atas kejadian yang telah mengakibatkan banyak orang Muslim Rohingya yang tewas, serta korban-korban dari pihak lainnya.

Merupakan fakta bahwa kawasan ASEAN merupakan kawasan yang heterogen dengan berbagai unsur

² "Rombongan PKS untuk Rohingya tiba di Myanmar," <http://www.merdeka.com/peristiwa/rombongan-pks-untuk-rohingya-tiba-di-myanmar.html>, diakses 22 Agustus 2012.

sosial-budaya yang melingkupinya, Presiden AIPA ke-33 mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat menjalankan kebijakan politik yang menjamin suasana hidup berdampingan yang damai dan harmonis antara warga negara yang berbeda latar belakang agama, ras, bahasa dan lainnya. Untuk itu, dibutuhkan kemauan politik Pemerintah Myanmar untuk mengakui keberadaan ras Rohingya/Bengalis di dalam struktur sosial-kemasyarakatan dan politik kenegaraan di Myanmar, sehingga penduduk Muslim dan Budha di Myanmar dapat hidup berdampingan secara damai. Presiden AIPA ke-33 / Ketua DPR RI memiliki kepedulian yang tinggi untuk mewujudkan terciptanya keharmonisan dalam keragaman antar pemeluk agama, suku, bahasa, dan lainnya di dalam masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Terlebih lagi, secara bilateral hubungan Indonesia – Myanmar telah terjalin baik selama lebih dari 60 tahun, dimana kedua negara memiliki beberapa kesamaan dalam hal warisan budaya dan sejarah, serta sama-sama memiliki populasi yang heterogen dengan latar belakang suku bangsa dan agama yang beragam.

Perhatian DPR RI dan Ketua DPR RI terhadap Permasalahan Rohingya

Ketua DPR RI yang juga menjabat Presiden AIPA ke-33 merasa berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi kepedulian dan kemarahan publik Indonesia atas peristiwa kerusuhan sosial di Rakhine Myanmar yang mengakibatkan banyak korban tewas, termasuk dari kalangan muslim Myanmar. Kondisi tersebut juga dikarenakan terjadinya arus pengungsi Rohingya Myanmar yang keluar dari wilayah konflik yang sudah mencapai Indonesia, Thailand, dan Bangladesh dalam jumlah pengungsi yang tidak sedikit, sehingga tidak dapat dikategorikan lagi sebagai isu domestik Myanmar belaka.

Sebagai bentuk kepedulian atas peristiwa di Rakhine Myanmar, Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33 telah melayangkan surat kepada Ketua Parlemen Myanmar, **H.E. Khin Aung Myint**, mendesak Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kerusuhan komunal di Rakhine Myanmar segera dan dengan pendekatan solutif yang adil dan benar. Atas pernyataan tertulis tersebut, Ketua DPR RI juga telah menerima tanggapan dari pihak Parlemen Myanmar yang memuat klarifikasi dan keberatannya atas pernyataan tertulis beliau, sehingga terjadi balas-membalas surat atas isu tersebut. Selain dalam kapasitas sebagai Presiden



AIPA ke-33 dan Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie** juga menyampaikan kepeduliannya terhadap persoalan Rohingya dalam kapasitasnya sebagai Presiden *Parliamentary Union of OIC Member States* (PUIC).

Di samping peran Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33 dalam hal kepedulian terhadap isu kerusuhan komunal di Rakhine Myanmar, beberapa Anggota Dewan lain juga telah memberikan kepedulian yang serupa, di antaranya Komisi III DPR RI yang telah bertemu dengan pengungsi Rohingya di tempat penampungan pengungsi di Pasar III, Padang Bulan Medan (14 September 2012). Selain itu, kepedulian terhadap isu Rohingya juga dilakukan oleh beberapa Anggota DPR RI dari PKS, dalam wujud memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya (Agustus 2012).

Dari pihak eksekutif, perhatian/kepedulian juga diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, yang menyatakan (30 Juli 2012) bahwa Indonesia akan membawa tragedi di Rohingya, Myanmar, ke dalam agenda sidang darurat OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pihak lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI). Bertempat di Doha – Qatar dan bersama dengan CEO Qatar Charity, Yusuf bin Ahmed Al Kuwary, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla telah memberikan penjelasan strategi dan langkah konkrit penyelesaian konflik antaretnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar, Kamis, 4 Oktober 2012. Dari pihak LSM, di antaranya organisasi MER-C yang telah mengirimkan Komite Kesehatan dan Pertolongan Darurat Indonesia ke Myanmar, Masjid Istiqlal Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Muhammadiyah dan banyak lagi organisasi massa / LSM lainnya yang menyatakan pembelaan terhadap kaum muslimin Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Indonesia, DPR RI, Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33, dan sekaligus Presiden PUIC 2012 telah mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam persoalan Rohingya. Hal ini sendiri telah diakui oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam kunjungannya ke Indonesia, pada saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, dalam upaya turut membantu Pemerintah Myanmar menengahi dan menyelesaikan isu kerusuhan komunal di Myanmar.³

Dari Pihak Myanmar sendiri sudah membentuk komite investigasi dan mengundang kerja sama UNHCR dan WFP

3 "Hillary Apresiasi Peran Indonesia atas Rohingya," <http://www.merdeka.com/peristiwa/hillary-apresiasi-peran-indonesia-atas-rohingya.html>, diakses 4 September 2012.

untuk datang langsung ke tempat kerusuhan, menyaksikan dan mencari tahu langsung mengenai terjadinya kerusuhan komunal tersebut, di samping upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Myanmar.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai isu di kawasan berjalan atas dasar dorongan amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945 dan semangat cita-cita ASEAN, sebagaimana termaktub di dalam Piagam ASEAN.

Korespondensi Ketua DPR RI Terkait Isu Rohingya

Sebagai wujud amanah wakil rakyat Indonesia dan amanah kepemimpinan dalam organisasi AIPA serta organisasi PUIC, **Dr. Marzuki Alie** melayangkan surat keprihatinan kepada **H.E. Khin Aung Myint**, Ketua Parlemen Myanmar, atas terjadinya peristiwa kerusuhan komunal di Myanmar.

Sebagai tanggapan/balasan dari surat tersebut, Ketua Parlemen Myanmar telah menjelaskan bahwa kerusuhan komunal tersebut dipicu oleh tindakan kriminal pemerkosaan dan pembunuhan oleh tiga pemuda dari ras Bengalis/Rohingya yang diduga beragama Islam atas seorang wanita muda yang beragama Budha, dari ras Rakhine. Karena dipicu oleh tindak kriminal tersebut, terjadi penyerangan balasan dari warga ras Rakhine terhadap warga ras Bengalis/Rohingya, dan akhirnya pecah kerusuhan komunal tersebut.

Di samping itu, Ketua Parlemen Myanmar juga beranggapan bahwa isu kerusuhan komunal Rohingya adalah isu domestik, walaupun pada kenyataannya, ratusan pengungsi dari wilayah konflik Rakhine Myanmar sudah mencapai Indonesia, Thailand, dan Bangladesh. Ketua Parlemen Myanmar merasa berkeberatan bila isu kerusuhan komunal Rohingya Myanmar dimasukkan dalam agenda bahasan dalam Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, pada tanggal 16 s.d 22 September 2012. Alasan lain, karena isu kerusuhan komunal di Rakhine Myanmar tidak dibahas dan tidak ditetapkan sebagai agenda Sidang Umum AIPA ke-33, melalui pertemuan Sidang *Excom* AIPA sebelumnya yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 9 Juli 2012. Atas poin ini, sebenarnya Ketua DPR RI /Presiden AIPA ke-33 hanyalah menawarkan kepada Parlemen Myanmar, seandainya bersedia, untuk menjelaskan peristiwa tersebut kepada peserta delegasi Sidang Umum AIPA ke-33, dan



tentunya berdasarkan dan melalui aturan serta mekanisme keorganisasian AIPA. Dalam kelanjutan korespondensi suratnya dengan Ketua DPR RI, pihak Parlemen Myanmar bersedia untuk menjelaskan perihal peristiwa kerusuhan komunal Rohingnya secara *private* kepada siapapun pihak yang tertarik untuk mengetahui kondisi kejadian yang sebenarnya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian dari Parlemen Myanmar adalah penggunaan istilah genosida (*genocide*) dalam pernyataan tertulis Ketua DPR RI yang diberikan kepada media massa. Teks yang sebenarnya (dalam pernyataan tertulis tersebut) adalah “mengarah kepada genosida”, bukan menyatakan kejadian tersebut adalah genosida. Penyimpulan tersebut disebabkan fakta banyaknya korban tewas dan luka, serta situasi terjadinya arus pengungsian dalam jumlah besar-besaran dan mencapai lintas batas negara, bahkan telah menyentuh wilayah Indonesia. Namun, secara substansi apa yang menjadi perhatian utama dari Presiden AIPA ke-33 / Ketua DPR RI adalah mengingatkan kembali komitmen Myanmar terhadap demokrasi, agar dijalankan tidak hanya secara prosedural, misalnya, hanya dengan mengizinkan tokoh oposisi Aung San Su Kyii berkontestasi dalam pemilihan umum, namun juga harus berkomitmen terhadap substansi demokrasi, di antaranya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hidup dan hak kewarganegaraan etnis Rohingnya di Myanmar.

Dalam surat balasannya terhadap surat klarifikasi dari Ketua Parlemen Myanmar **H.E. Khin Aung Myint**, Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33 menyampaikan apresiasi terhadap keragaman pandangan/pendapat atas berbagai isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memang terkenal majemuk (heterogen), termasuk pandangan yang disampaikan oleh **H.E. Khin Aung Myint** atas berbagai poin terkait isu kerusuhan komunal di negara bagian Arakhan (Rakhine) di Myanmar. Untuk itulah, kerja sama kawasan yang berlangsung di tingkat eksekutif maupun legislatif (antar-parlemen) terasa sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan kerja sama untuk menuju hubungan dan kerja sama yang lebih erat dan harmonis di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Dalam kaitannya dengan kegiatan Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok (16 s.d. 22 September 2012), isu kerusuhan komunal di Rakhine Myanmar ini telah menjadi isu yang menarik dan diincar oleh para wartawan, baik lokal, nasional maupun luar negeri. Pihak tuan rumah (Indonesia) berpandangan bahwa AIPA adalah forum kerja sama antar-parlemen yang bersifat resmi dan sangat dihormati

di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, tentu sebagai tuan rumah, Indonesia akan melakukan yang terbaik bagi terselenggaranya secara sukses kegiatan tersebut dalam berbagai aspeknya, termasuk pula perihal kenyamanan dan keamanan dari semua delegasi pertemuan Sidang Umum AIPA ke-33, juga bagi delegasi Myanmar yang menaruh kekhawatiran terhadap aspek keamanan delegasinya selama berada di Indonesia.

Persoalan kerusakan komunal di wilayah Rakhine Myanmar serta korespondensi argumentatif atas isu kerusakan tersebut, dalam pandangan Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33 sepatutnya tidak boleh menghambat / menghalangi Indonesia dan Myanmar untuk terus bekerja sama dan membangun hubungan yang erat dan harmonis di antara keduanya, dalam upaya mewujudkan cita-cita kawasan, terbentuknya *ASEAN Community 2015* yang damai dan berkemakmuran.

Pada bagian akhir dari kegiatan Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, Nusa Tenggara Barat – Indonesia, Ketua DPR RI/Presiden AIPA ke-33 telah menjelaskan kepada para wartawan lokal dan luar negeri bahwa kerusakan komunal di wilayah Rakhine Myanmar bukanlah konflik agama/ras, melainkan karena dipicu oleh tindak kriminal yang melebar menjadi tindak kekerasan antarsuku. Namun, kerusakan tersebut sudah dapat dikendalikan dan telah berakhir. Pemerintah Myanmar terus berupaya melaksanakan rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi atas berbagai kerusakan, baik fisik maupun nonfisik yang terjadi di wilayah konflik. Penjelasan Ketua DPR RI tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan wartawan yang mengangkat isu kerusakan komunal di Myanmar.



I. Penutup:

Sudah Berhasilkah Indonesia Memimpin AIPA 2011–2012?

Beragam kegiatan dan peran aktif DPR RI dalam aktivitas regional Asia Tenggara dilakukan melalui inisiatif-inisiatif reguler maupun mandiri untuk mewujudkan eksistensi *ASEAN Community*. Tugas kita masih panjang, terutama bagi parlemen, yang merepresentasikan keragaman politik dari masing-masing negara anggota ASEAN.

ASEAN setidaknya menghadapi dua tantangan berat yang terpotret dalam perjalanannya, yakni tantangan internal berupa soliditas asosiasi ini dan tantangan eksternal yang berkuat pada sikap, pandangan, dan kebijakan dunia internasional terhadap ASEAN.

all well when ends well...

“ After a week of long speeches, intensive discussions, meticulous notes comparison, and serious deliberations, delegates from the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Countries concluded the 33rd General Assembly with a well-earned Solidarity Dinner.

Serious and intense legislators finally let their hair down, as each country delegation sang and dance for their fellow delegates, as well as observer countries and organisations, and invited guests. And in equally good spirit of camaraderie, the audience gave every performer a hearty round of applause, complete with loud whistles and cheers. ”

ASEAN News

*Danny Lee, Director for Community Affairs Development
Desi Hanara, ASEAN Secretariat*

Penguatan soliditas dan solidaritas parlemen, hingga upaya menjalin kerja sama antar-parlemen dengan kekuatan-kekuatan baru dunia (*emerging economies*) merupakan upaya kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dunia internasional juga telah memandang kita sebagai asosiasi yang vital bagi perubahan global. Namun, ASEAN juga kerap hanya menjadi pasar dan bukan pemain. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Asia Tenggara sebagai kawasan yang strategis dalam percaturan global, adalah tugas kita selanjutnya.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam perwujudan *ASEAN Community* tentunya merupakan hal yang sudah tidak diragukan lagi. Ini tentu berlaku pula bagi eksistensi hubungan antar-parlemen di Asia Tenggara yang digalang via AIPA. Dan tentu saja, ke depan, DPR RI memegang komitmen dan akan meningkatkan partisipasi aktifnya dalam upaya-upaya kolektif Asia Tenggara menuju pembentukan *ASEAN Community* sekaligus menjaga eksistensinya.

Sebagaimana dikemukakan di awal buku ini, lembar demi lembar dan halaman demi halaman buku ini akan menjadi rekaman sejarah aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI. Tulisan ini menjadi acuan, telah sejauh mana DPR RI telah bergerak untuk *ASEAN Community 2015*.

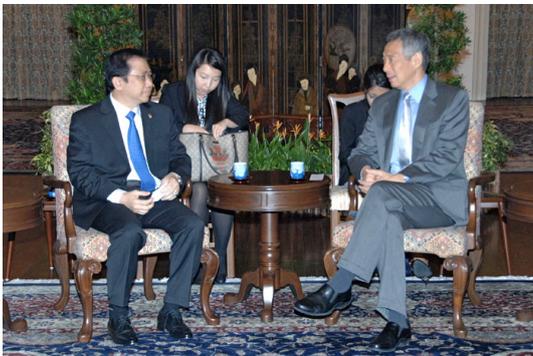
Scripta manent verba volent, dan sampai jumpa 10 tahun lagi!



Sidang AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace Yogyakarta, 16 s.d. 19 Juli 2012



Lawatan ke Malaysia, Singapura, Myanmar 24 s.d. 30 Juni 2012

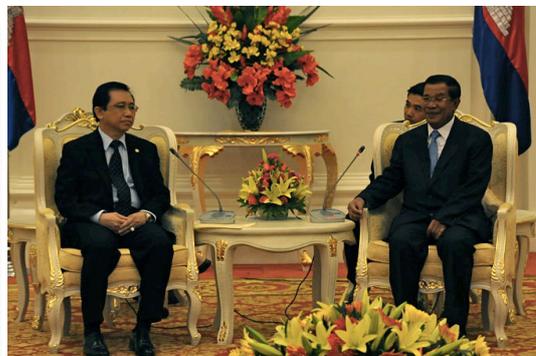
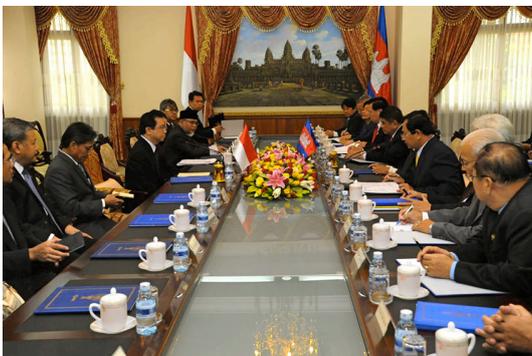
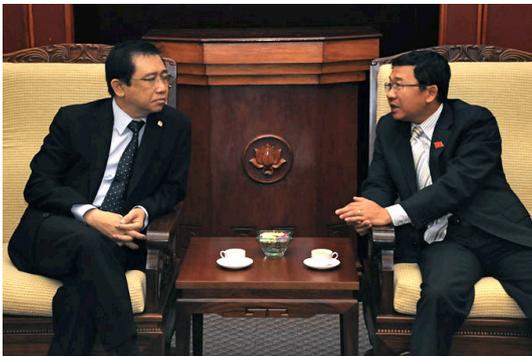
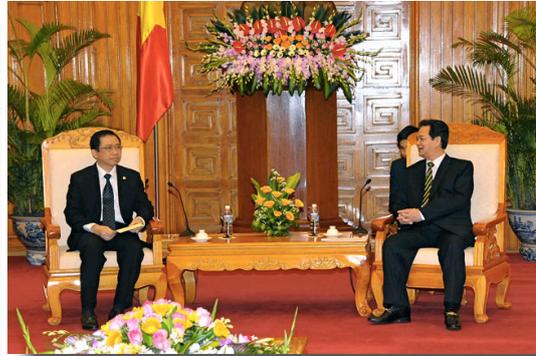




AIPA Visit ke India **29 Juli s.d. 3 Agustus 2012**



**Lawatan ke Vietnam, Thailand, dan
Kamboja**
4 s.d. 8 September 2012





Sidang Umum AIPA ke-33 Lombok, Nusa Tenggara Barat 16 s.d. 22 September 2012



Sidang Umum AIPA ke-33 Lombok, Nusa Tenggara Barat 16 s.d. 22 September 2012





Tim Penyusun

Endah TD Retnoastuti
Partogi Poltak Nainggolan
Heriyono Anggoro
Taufiqurahman
Mariana Anisa
Leni Mailani
Yudha Akbar Pally

Tim Kreatif

R. Anne Widiana
Endang Dwi Astuti
Bowo Hoetomo
Hikmah
Hilda Kurnia Ningsih
Lita Puspita
Miranti Widiani
Wirawan Narendro Putro

Published by
**The House of Representatives of
The Republic of Indonesia
2012**

Secretariat of Regional Parliamentary Organizations
The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation
Secretariat General of the House of Representatives of
The Republic of Indonesia
6th Floor, Nusantara 3 Building
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta
10270
Indonesia

Tel.: +62 21 5715 294, 210, 842
Fax: +62 21 5715 395
E-mail: oprbksap@dpr.go.id
Web site: www.dpr.go.id

Copyright © The House of Representatives of the Republic
of Indonesia

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from the publisher, except you may download, reprint, reproduce and share the images and information from electronic version on World Wide Web site for non-commercial, private purposes. However, you may not manipulate or alter in any way the images and information. All artwork and photography is by the publisher.